



**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
PROFESIONALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Siti Ulya Ani

NIM 7101416310

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Selasa

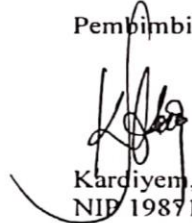
Tanggal : 19 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Ahmad Nurghini, S.Pd., M.Si.
NIP. 198201302009121005

Pembimbing


Kardiye, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198712282015042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juni 2020


Penguji I


Dr. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 196005241984051001

Penguji II


Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si.
NIP. 198601082015042001

Penguji III


Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198712282015042001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heriyanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulya Ani

NIM : 7101416310

Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 08 Desember 1997

Alamat : Jl. Mawar Ds. Nganguk Mranggen Rt. 04 Rw. 05
No. 480 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus 59311

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Mei 2020



Siti Ulya ani

NIM. 7101416310

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya yaitu Bapak Amadji dan Ibu Kasmini, Orang tua yang selalu mendukung apa yang saya cita-citakan, selalu sabar dalam menghadapi saya, selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, dan tidak ada hentinya dalam memberi semangat untuk saya.
- ❖ Mbak Eni tersayang.
- ❖ Segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya.
- ❖ Rekan-rekan Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) 2016 Rombel A dan semua pihak yang telah membantu
- ❖ Kampus Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Peran Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)” dapat peneliti selesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sampai terselesainya skripsi ini.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sampai terselesainya skripsi ini.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Kardiyem, S.Pd., M.Pd., Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan petunjuk, arahan, dan motivasi dalam menyusun skripsi.

5. Dr. Kusmuriyanto, M.Si selaku Dosen penguji I yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
6. Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si selaku Dosen wali dan Dosen penguji II yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Bapak Amadji, Ibu Kasmini dan Kakak Eni Puji Wahyuni tersayang, yang telah memberikan perhatian, semangat, serta doa yang tiada hentinya menglair demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen serta staf karyawan di Universitas Negeri Semarang khususnya Jurusan Pendidikan Ekonomi yang memberikan banyak pengalaman, kesempatan belajar serta inspirasi selama penulis menjalani studi di Universitas Negeri Semarang.
9. Camat Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
10. Seluruh aparatur pemerintah desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) Rombel A tahun angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Mei 2020

Peneliti

SARI

Ani. Siti Ulya. 2020. *“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)”*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: **Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Profesionalitas, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus belum maksimal. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum maksimal memunculkan masalah seperti terjadinya kesalahan-kesalahan administratif yang terjadi di banyak desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pengelola dana desa di Kecamatan Kota berkaitan dengan peran profesionalitas dalam memoderasi partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa pengelola di Kecamatan Kota. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 64 orang. Sampel dari penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi dari 16 desa di Kecamatan Kota. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak.

Hasil deskriptif penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Profesionalitas tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Profesionalitas tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Saran untuk penelitian ini hendaknya aparatur pemerintah desa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan membaca literatur, mengadakan pelatihan siskeudes, membuat jadwal pemeliharaan peralatan, sering mengadakan acara pertemuan warga agar tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat yang baik, serta pemerintah desa memberikan persyaratan khusus dalam perekrutan aparatur pengelola dana desa.

ABSTRACT

Ani, Siti Ulya. 2020. “ *The Influence of Community Participation, Internal Control Systems and the Utilization of Information Technology on the Accountability of Village Fund Management With Professionalism as a Moderation Variable (Case Study in Sub-District Cities, Kudus Regency)*”. Essay. Departement of Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang.

Counselor: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Community Participation, Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Professionalism, Accountability of Village Fund Management

The accountability of village fund management provided by the village government in Kota District, Kudus Regency is not yet optimal. Accountability of village fund management which has not been maximally raises problems such as administrative errors that occur in many villages. This study aims to analyze the accountability of village fund management carried out by the apparatus of village fund managers in Kota District in relation to the role of professionalism in moderating community participation, internal control systems and the use of information technology.

This study uses a quantitative approach. The population of this research is all village government administration apparatuses in Kota District. This study uses a saturated sample technique with 64 respondents. The sample of this study consisted of village heads, village secretaries, village treasurers, and section heads from 16 villages in Kota District. The data collection method uses a questionnaire. Data analysis techniques using descriptive analysis and moderation regression with absolute difference test.

Descriptive results of the study indicate that there is a positive influence between community participation and the use of information technology on village fund management accountability. The internal control system has a negative effect on the accountability of village fund management. Professionalism did not succeed in moderating the influence of community participation, internal control systems, and the use of information technology on village fund management accountability.

Based on the analysis, the conclusion of this study is community participation and the use of information technology affect the accountability of village fund management. The internal control system has a negative effect on the accountability of village fund management. Professionalism did not succeed in moderating the influence of community participation, internal control systems, and the use of information technology on village fund management accountability. Suggestions for this research should the village government apparatus increase competence by attending training and reading literature, conducting siskeudes training, making equipment maintenance schedules, often holding community meetings to maintain good communication with the community, and the village government providing special requirements in recruiting apparatus managers village fund.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Cakupan Masalah	14
1.4 Perumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Kegunaan Penelitian	15
1.6.1 Secara Teoritis	15
1.6.2 Secara Praktis	16
1.7 Orisinalitas	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	18
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	18
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	18
2.2 Kajian Variabel Penelitian	21
2.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	22
2.2.2 Partisipasi Masyarakat	25
2.2.3 Sistem Pengendalian Intern	29
2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	33
2.2.5 Profesionalitas	37
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	39

2.4 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	54
3.2 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampel	54
3.3 Variabel Penelitian	56
3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	56
3.3.2 Partisipasi Masyarakat	56
3.3.3 Sistem Pengendalian Intern	57
3.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	58
3.3.5 Profesionalitas	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.5 Uji Instrumen Penelitian	61
3.5.1 Uji Validitas	62
3.5.2 Uji Reliabilitas	67
3.6 Teknik Analisis Berganda	68
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	68
3.6.2 Analisis Uji Regresi Moderasi	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Hasil Penelitian	77
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	77
4.1.2 Analisis Statistik Dekriptif	79
4.1.3 Uji Prasyarat	94
4.1.4 Uji Asumsi Klasik	96
4.1.4.1 Uji Multikolinearitas	96
4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas	97
4.1.5 Hasil Analisis Model Regresi Moderasi	98
4.1.6 Uji Hipotesis Penelitian	101
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	107
4.2.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	107
4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	110
4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	112
4.2.4 Peran Profesionalitas Memperkuat Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	115
4.2.5 Peran Profesionalitas Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	117
4.2.6 Peran Profesionalitas Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	118

BAB V PENUTUP	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDesa Tahun 2018	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kudus	55
Tabel 3.2 Skala Pengukuran.....	61
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	62
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat	64
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern	64
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	66
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalitas	67
Tabel 3.8 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian	68
Tabel 3.9 Jenjang Kriteria Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa....	69
Tabel 3.10 Jenjang Kriteria Variabel Partisipasi Masyarakat	70
Tabel 3.11 Jenjang Kriteria Variabel Sistem Pengendalian Intern	70
Tabel 3.12 Jenjang Kriteria Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	71
Tabel 3.13 Jenjang Kriteria Variabel Profesionalitas	73
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner yang Dihimpun	78
Tabel 4.2 Tingkat Penyebaran Kuesioner	79
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Penelitian	79
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	82
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	83
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	83
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat	84
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat	85
Tabel 4.9 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Partisipasi Masyarakat.....	86
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Intern	86
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern	87
Tabel 4.12 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Sistem Pengendalian Intern	88
Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	89
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Teknologi Informasi	89
Tabel 4.15 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	90
Tabel 4.16 Statistik Deskriptif	91
Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi	92
Tabel 4.18 Analisis Deskriptif Indikator Variabel	93
Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas	94
Tabel 4.20 Hasil Uji Linearitas	95
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas	96
Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	97
Tabel 4.23 Hasil Uji Regresi Moderasi (Uji Nilai Selisih Mutlak)	98
Tabel 4.24 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik)	102
Tabel 4.25 Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2).....	104

Tabel 4.26 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	106
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	53
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian	132
Lampiran 2 Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian.....	133
Lampiran 3 Kuesioner Uji Coba Penelitian	135
Lampiran 4 Tabulasi Uji Coba Penelitian.....	147
Lampiran 5 Hasil Uji Coba Validitas	157
Lampiran 6 Hasil Uji Coba Reabilitas	175
Lampiran 7 Daftar Responden Penelitian	177
Lampiran 8 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	178
Lampiran 9 Kuesioner Penelitian.....	180
Lampiran 10 Tabulasi Hasil Penelitian	191
Lampiran 11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	201
Lampiran 12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator.....	203
Lampiran 13 Hasil Uji Prasyarat.....	214
Lampiran 14 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	215
Lampiran 15 Hasil Penelitian.....	216
Lampiran 16 Surat Izin Penelitian.....	217

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan ujung organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pemerintah dari urusan pemerintahan. Desa mempunyai peran untuk mengurus masyarakat serta mengatur sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Masa pemerintahan tahun 2014-2019 ada sebuah orientasi pembangunan yang tertuang di dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan memberikan dana desa (Bappenas, 2017). Dana desa yang diberikan dapat digunakan untuk membangun desa dan dapat memanfaatkan potensi desa dengan maksimal. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa di dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk keuangan dan kekayaan milik desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.

Dana desa ini diharapkan mampu menjadi modal untuk pengembangan desa agar desa menjadi lebih mandiri. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola dan mengolah potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dilakukan supaya desa dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan desa, seperti jalan, jembatan,

posyandu, dan fasilitas lainnya dapat digunakan bersama oleh masyarakat desa. Harapannya sebagian dari dana desa tidak hanya disalurkan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga disalurkan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurut Surat Harian Sumatera Express menyebutkan Alokasi dana desa tahun 2019 untuk anggaran Bumdes sebesar 20% dari jumlah alokasi dana desa. Bumdes diadakan untuk mengolah potensi desa, misalnya desa yang memiliki potensi pariwisata. Desa yang tidak memiliki potensi khusus bisa membangun usaha sendiri seperti koperasi, PAM, dan usaha yang lain. Hal ini dimaksudkan agar desa dapat menjadi desa yang mandiri, dan mengurangi pengangguran di desa tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Kendala tersebut disebabkan oleh keuangan desa yang sumbernya belum jelas. Desa yang diharapkan memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), akan tetapi masih banyak yang belum memiliki. Beberapa desa belum sadar akan potensi desanya, berbeda dengan yang memiliki kekayaan wisata. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa ini telah mendapat solusi yaitu berupa dana desa.

Pemerintah pusat setiap tahun telah memberikan kenaikan anggaran yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dimulai dari tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 628 juta setiap desa. Tahun 2017 dana tersebut naik menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata sebesar Rp. 800 juta setiap desa. Jumlah yang sama pada tahun 2018 yakni Rp. 60 triliun dan setiap

desa memperoleh rata-rata sebesar Rp. 800 juta. Tahun 2019 mengalami kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh desa yang ada di Indonesia (Buku Saku Dana Desa, 2019).

Berdasarkan evaluasi selama empat tahun yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 terhadap pelaksanaan dana desa, dana desa telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu: terbangunnya 191,6 ribu kilometer jalan desa, 1.140,4 kilometer jembatan desa, 9 ribu unit pasar desa, 4.175 unit embung desa, 24,8 ribu unit posyandu, 959,6 ribu unit sarana air bersih. Kemudian 240,6 ribu unit mandi, cuci, kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD, dan 29,5 juta unit drainase dalam periode 2015-2018. Dana desa tidak hanya menghasilkan sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat (Buku Saku Desa, 2019).

Pengembangan ekonomi masyarakat ini melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dana desa selama tahun 2016-2018 telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 17,8 juta jiwa (14,2%) pada tahun 2015 menjadi 15,8 juta jiwa (13,2%) pada tahun 2018. Dana desa juga telah berhasil meningkatkan status 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan status 2.665 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini pihaknya masih memperhatikan dan mengawasi penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pasalnya, dari realisasi TKDD yang per 30 November 2019 mencapai 752,8 triliun atau 91,06 persen dari pagu alokasi di APBN 2019, sepertiganya mengendap di rekening simpanan daerah. Masalah dari penyaluran TKDD terletak pada realisasi dana alokasi khusus fisik yang masih mengalami kontraksi. Hingga akhir November 2019, realiasi DAK fisik mencapai 47,89 triliun lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 51,42 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 69,09 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan APBN yaitu sebesar 69,32 triliun. Menanggapi hal tersebut Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia (BI) untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasi anggaran (Money.kompas.com, Jakarta, 19 Desember 2019).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi yang cukup besar dari dana desa. Jumlah desa yang menerima anggaran dana di Jawa Tengah berjumlah 7.809 desa dengan anggaran pada tahun 2015 sebesar 2,2 triliun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 5 triliun, tahun 2017 meningkat menjadi 6,3 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi 6,7 triliun, dan tahun anggaran 2019 naik 17,10 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 7,8 triliun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil Jawa Tengah menyatakan faktor yang menyebabkan pengelolaan dana desa masih minim yaitu 3.500 pendamping lokal desa dan pendamping desa, 500 diantaranya

mengundurkan diri dengan berbagai alasan, hal tersebut berdampak pada kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni (Bisnis.tempo.co, 13 Juli 2019).

Berdasarkan Surat Harian Tribun Jateng, 25 November 2019 permasalahan dana desa tidak hanya terjadi pada daerah yang mendapat alokasi dana desa terbanyak, Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat alokasi paling sedikit yaitu sebesar 139,077 miliar namun dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan masalah. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan antara lain karena kurangnya sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan membuat dana desa tidak terealisasi secara maksimal. Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menjadi salah satu kecamatan yang semenjak dana desa dicairkan masih memprioritaskan dananya pada pembangunan jalan, pos kampling, dan tempat peribadatan. Dana desa di Kecamatan Kota diharapkan mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur, namun nyatanya sebagian besar desa belum bisa mencairkan dana karena belum merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dana yang jumlahnya sebesar Rp 139,077 miliar harus dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah desa yang kompeten dan berkualitas. Pengelolaan harus sesuai dengan prinsip pengelolaan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan pengelolaan dana desa. Mengingat pemerintah desa memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang pemerintah desa harus menyediakan informasi mengenai apa yang dikerjakan agar kebohongan sulit untuk disembunyikan.

Prinsip pengelolaan desa selain transparan yakni akuntabel. Akuntabel dalam pengelolaan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Partisipatif adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi dalam pengelolaan merupakan penentuan kebijakan publik yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah di desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, di Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa. Desa tersebut masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini berdampak pada penyerapan dana desa tahap berikutnya terhambat. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus banyak operator siskeudes yang sering berganti sehingga diperlukan Bimtek ulang dan kurangnya partisipasi dari sumber daya manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan data laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang bersumber dari data Kabupaten Kudus yang telah disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDesa Tahun 2018

No.	Nama Desa	Nomor Peraturan Desa	Tanggal Pertanggungjawaban
1.	Nganguk	Nomor 03 Tahun 2019	18 Mei 2019
2.	Glantengan	Nomor 02 Tahun 2019	4 Mei 2019
3.	Kramat	Nomor 02 Tahun 2019	11 Maret 2019
4.	Mlati Lor	Nomor 03 Tahun 2019	7 Mei 2019
5.	Rendeng	Nomor 03 Tahun 2019	20 Maret 2019
6.	Burikan	Nomor 03 Tahun 2019	7 Mei 2019
7.	Barongan	Nomor 02 Tahun 2019	21 Maret 2019
8.	Kaliputu	Nomor 04 Tahun 2019	29 Maret 2019
9.	Singocandi	Nomor 02 Tahun 2019	14 Mei 2019
10.	Kauman	Nomor 03 Tahun 2019	21 Maret 2019
11.	Langgardalem	Nomor 02 Tahun 2019	13 Mei 2019
12.	Krandon	Nomor 04 Tahun 2019	2 Maret 2019
13.	Damaran	Nomor 02 Tahun 2019	1 Mei 2019
14.	Demaan	Nomor 03 Tahun 2019	18 Maret 2019
14.	Demangan	Nomor 03 Tahun 2019	9 April 2019
16.	Janggalan	Nomor 04 Tahun 2019	16 April 2019

Sumber : Data Kabupaten Kudus

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa seharusnya disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan terakhir setelah tahun anggaran. Berdasarkan data Tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa yang masih belum baik. Hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan dana desa yang kurang akuntabel.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu *Stewardship Theory*. Akuntabilitas pengelolaan erat kaitannya dengan

Stewardship Theory. Donaldson et al. (1991) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara *agency theory* yaitu *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya secara akuntabel. Tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Hasil pengelolaan secara akuntabel yang memuaskan akan menciptakan kepuasan bagi pemerintah desa karena *Stewardship Theory* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan. Kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh *principal* menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga, dan hal inilah yang menjadi dasar dari *Stewardship Theory*. Inti dari teori ini yaitu mencakup 2 hal yaitu faktor psikologi dan faktor situasional. Rangkaian pemahaman demikian, maka penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory* sebagai landasan kajian.

Kajian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia sudah banyak dilakukan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan Mada et al.,

(2017) dengan hasil yang diperoleh partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan sebesar 23% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif sebesar 54,5%. Kedua penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak ada pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Faktor selain partisipasi masyarakat adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian terdahulu tentang sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Yesinia et al., (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh sebesar 2,9% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Wardani dan Andriyani (2017) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh sebesar 44,9% terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Berbeda dengan hasil penelitian Mutmainah dan Pramuka (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengelola keuangan dalam hal ini aparatur desa diharuskan menggunakan aplikasi. Aplikasi tersebut erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian terdahulu pemanfaatan teknologi informasi mengalami hasil ketidakkonsistenan, menurut Idward (2017) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 1,5% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal yang sama dari penelitian Perdana (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 40,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian Wardani dan Andriyani (2017) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten, maka penulis ingin meneliti kembali dengan menghadirkan variabel moderasi yaitu profesionalitas aparatur. Penelitian ini dilakukan untuk memantapkan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Faktor terpenting di pemerintahan desa yaitu perangkat desa dan kepala desa yang merupakan sumber daya manusia yang tersusun dalam struktur organisasi desa. Profesionalitas pada aparatur desa diharapkan akan memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan untuk kemajuan desa. Sama halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern diharapkan dengan profesionalitas aparatur yang tinggi akan memperkuat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi semakin baik.

Profesionalitas menurut Kurniawan (2005:74) menyatakan bahwa suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalitas menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. *Stewardship Theory* oleh Donaldson *et al* (1991) menjelaskan bahwa *steward* mempunyai sifat bertanggungjawab dengan kompetensi, integritas, jujur dan dapat dipercaya. Profesionalitas dapat diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seorang aparatur desa mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Hasil penelitian Tudikromo (2015) mengungkapkan bahwa profesionalitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Alasan dipilihnya profesionalitas sebagai variabel pemoderasi karena terkait dengan kemampuan profesional dalam menggerakkan orang atau masyarakat desa dan efektifitas partisipasi masyarakat yang turut andil sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparatur. Hal tersebut memberikan dampak terhadap persepsi serta harapan masyarakat terhadap output yang dihasilkan aparatur. Keterlibatan kerja kelompok atau individu yang efektif tergantung pada interaksi aparatur desa dengan masyarakat serta sampai tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh. Seorang aparatur juga harus memberikan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara kontinu terhadap sistem pengendalian internal. Penulis menduga bahwa semakin tinggi profesionalitas yang diterapkan

maka akan memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih efektif. Hal itu aparat desa harus meningkatkan kemampuan profesionalitas yang baik sesuai dengan kebutuhan zaman modernisasi teknologi yang begitu pesat.

Berdasarkan paparan *fenomena gap* didukung data, teori, dan *riset gap*, peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)**”. Harapannya dengan penelitian ini akan menambah wawasan bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa secara akuntabel. Disisi lain juga sebagai perhatian kepada aparat desa agar pengelolaan dana desa dapat terserap dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah untuk dicari penyelesaiannya :

1. Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sangat besar yakni Rp 7,8 triliun, sehingga banyak perangkat desa yang menyalahgunakan dana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa.
2. Berdasarkan temuan Menteri Keuangan tahun 2019 menyebutkan bahwa realisasi dana alokasi khusus fisik masih mengalami kontaksi sehingga masyarakat dan pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana desa.

3. Berdasarkan temuan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah tahun 2019 terjadi penyerapan dana desa yang masih belum optimal sehingga pengelolaan dana desa masih harus diawasi.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa sehingga memperlambat pelaporan administrasi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya sistem pengendalian intern dalam membuat laporan keuangan sehingga permasalahan administrasi sering terjadi, kurangnya pemanfaatan dalam teknologi informasi sehingga sering terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Perdana (2018) yaitu Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Kumalasari (2018) yaitu Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, dan Sistem Pengendalian Intern.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Wardani dan Andriyani (2017) yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Umaira dan Adnan (2019) Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peran profesionalitas.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah profesionalitas memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah profesionalitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah profesionalitas memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis profesionalitas dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Menganalisis profesionalitas dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Menganalisis profesionalitas dalam memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1.6.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan pengelolaan dana desa mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6.2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Penulis

Bagi Penulis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

3. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa sebagai unit analisis penelitian, harapannya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.7. Orisinalitas

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Martini et al., (2019) mengenai sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat satu variabel independen (sistem pengendalian internal) dan variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Perbedaan

dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen dan variabel moderating. Penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan variabel moderating profesionalitas.

Alasan menambah variabel independen tersebut mengacu pada penelitian oleh Kumalasari (2018) hasil penelitian tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penambahan variabel moderating profesionalitas dalam penelitian ini didasari pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tudikromo (2015) mengenai pengaruh profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah profesionalitas memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur yang profesionalitas merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*). Teori *Stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini mengemukakan bahwa manajer eksekutif ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pelayan yang baik bagi perusahaan. Teori ini menyatakan tidak ada motivasi untuk kepentingan manajer eksekutif, sehingga manajer eksekutif jauh dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik seperti yang dicita-citakan. Para manajer eksekutif tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada kepentingan perusahaan.

Peran manajer eksekutif secara khusus akan membantu manajer dan anggota dewan perusahaan dalam mencapai kinerja yang unggul. Situasi tersebut akan tercapai apabila manajer eksekutif berperan sebagai ketua dewan yang memiliki kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang. Hal yang diharapkan kepemimpinan perusahaan akan lebih jelas dan konsisten baik bagi manajer dan anggota dewan perusahaan. Manfaat dengan adanya peran manajer eksekutif adalah kesatuan arah dan komando yang kuat dan terkontrol. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah teori *Stewardship* tidak berfokus pada tujuan individu melainkan menjadi fasilitator dalam pemberdayaan untuk perusahaan. Penggabungan jabatan antara manajer eksekutif dengan manajer dan anggota

dewan perusahaan akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam kepentingan perusahaan.

Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah, sebab instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba namun lebih cenderung kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai prinsipnya. Instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa yang memiliki tugas yang bertanggungjawab terhadap masyarakat desa. Salah satu tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa yaitu mengelola dana desa. Aparatur pemerintah desa yang mengelola dana desa harus aparatur yang kompeten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Aparatur pengelola dana desa seharusnya mengesampingkan kepentingan individunya dan lebih mengutamakan menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa, sebab yang diinginkan dari aparatur pemerintah desa adalah hasil terbaik untuk tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa. Aparatur desa dalam mengelola dana desa kemungkinan bekerja orientasinya adalah untuk kesejahteraan desa. Aparatur desa sudah selayaknya harus mengelola dana desa dengan baik digunakan sebagaimana mestinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil yang baik dalam pengelolaan dana desa akan diperoleh apabila aparatur pemerintah desa yang memiliki dana desa memiliki partisipasi, pengendalian intern, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjang dengan profesionalitas dari aparatur yang tinggi.

Teori *Stewardship* oleh Donaldson et al (1991) menjelaskan faktor-faktor akuntabilitas pengelolaan meliputi faktor psikologi dan faktor situasional. Faktor psikologi adalah suatu penyederhanaan mengenai tingkah laku manusia atas suatu argumentasi, selain itu manusia mempunyai kebutuhan untuk berkembang sesuai kebutuhan melebihi dari keadaan sekarang dan akan mencapai level yang paling tinggi dengan sukses dan diasumsikan secara ekonomi manusia dipandang sebagai orang yang dibatasi oleh kemampuan untuk mencapai *full* potensial. Faktor psikologi meliputi motivasi, identifikasi, dan penggunaan kekuasaan. Faktor situasional meliputi filosofi manajemen, budaya, dan rentang kekuasaan.

Stewardship Theory menjadi dasar penelitian ini dalam menentukan variabel partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, profesionalitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari elemen faktor budaya. Faktor budaya memiliki aspek paham individual dan paham kolektif yang berpengaruh dalam memilih hubungan agen dan *steward*. Paham individual karakteristiknya ditekankan pada tujuan-tujuan personal diluar tujuan kelompok. Paham kolektif ditekankan pada tujuan-tujuan personal subordinat pada tujuan-tujuan kolektif. Budaya kolektif, seseorang merupakan bagian anggota dari suatu group misalnya keluarga, universitas, organisasi. Sikap individual melihat pertentangan sebagai kesempatan untuk melakukan pekerjaan dan komunikasi yang diadakan secara langsung. Organisasi pada paham kolektif erat kaitannya dengan faktor partisipasi masyarakat yang menekankan pada tujuan kelompok.

Filosofi manajemen dalam *Stewardship Theory* Donaldson et al, (1991) merupakan faktor situasional. Filosofi ini konsisten dengan Argyris (1973) yang menyatakan bahwa desain organisasi yang didasarkan pada asumsi ekonomi menciptakan pemenuhan sendiri yang diperkirakan menghasilkan perilaku yang konsisten dengan asumsi. Mengikuti alasan ini, evolusi manajemen yang berorientasi keterlibatan adalah lebih dominan dalam model yang mengarah pada timbulnya perilaku yang lebih konsisten dengan *Stewardship Theory* Donaldson et al, (1991). Filosofi manajemen ini erat kaitannya dengan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem pengendalian intern yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008).

Faktor motivasi juga merupakan salah satu faktor akuntabilitas yang mengemukakan bahwa ada tiga keadaan yang bersifat memotivasi psikologi yaitu pengalaman memahami pekerjaan, pengalaman bertanggungjawab atas hasil, dan pemahaman atas hubungan yang nyata. Faktor tersebut sebagai penengah hubungan antara karakteristik tugas dan motivasi kerja internal. Fasilitas yang layak perlu dicapai, oleh sebab itu job perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan *feedback*. Semua faktor ini berhubungan menambah kesempatan untuk berkembang dan bertanggungjawab dari pekerjaan. Keahlian yang dimaksud

dalam faktor motivasi erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1.1. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban”. Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah, dimana pemerintah mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Yuliansyah dan Rusmianto 2017: 32). Menurut Buku Saku Dana Desa (2017), “Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Medianti (2018) menyatakan “Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya”. Pengelolaan keuangan desa akan berjalan ketika memiliki tata pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa dengan prosedur yang berlaku yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan alokasi dana desa. Pencapaian tujuan upaya proses pengelolaan yang dilakukan yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan (Soemantri 2011 :160)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelola keuangan daerah tersebut (Halim, 2007)

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Hal ini semua kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama di wilayahnya.

2.2.1.2. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 113 tahun 2014, indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah :

1. Perencanaan, suatu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari berikutnya. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2.2.2. Partisipasi Masyarakat

2.2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat pembelajaran yang dapat memberikan perubahan kekuatan sosial melalui suatu organisasi masyarakat Rustiadi et al., (2009). *Partisipatif*, berarti pelayanan publik mendorong dan membutuhkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi atau kontrol pelaksanaan pelayanan publik (Wibowo dan purnomo 2007:12). Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Mubyarto (1998) dalam Kali (2011) mendefinisikan partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Soetrisno (1995) dalam Kali (2011) mengatakan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Berdasarkan pemaparan enam pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Keterlibatan dan kontribusi tersebut bisa secara fisik dan mental dalam berbagai kegiatan bersama, sebagai realisasi akan hak dan kewajiban setiap warga. Pentingnya partisipasi atau keikut-sertaan masyarakat maka partisipasi menjadi kunci segala sesuatu, termasuk sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan.

2.2.2.2 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka tujuan dasar dari partisipasi masyarakat di Indonesia adalah :

- a. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara.
- c. Membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan cepat (Suratmo, 2009).

2.2.2.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Manfaat partisipasi masyarakat:

- a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif yang akan dan harus dilakukan.
- b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.

2.2.2.4 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Anwas (2014:92) Salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja dan bukan juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Indikator dari partisipasi masyarakat menurut Heller *et al* (1984) dan Sujarweni (2015) adalah:

- a. Pengambilan keputusan, misalnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa.
- b. Penyusunan anggaran, misalnya mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna.
- c. Pelaksanaan anggaran, misalnya terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, memberikan penghargaan

2.2.3. Sistem Pengendalian Intern

2.2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat. Menurut Rai (2008: 283) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut : “Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya”.

Fadilah (2011) mendefinisikan pengendalian intern sebagai sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses perencanaan dan penerapan lima unsur (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) secara integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pimpinan atau manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit pengelola dana desa. Pengendalian intern sangat penting dalam kehidupan suatu pemerintah desa karena bisa

mengendalikan jalannya operasional pemerintahan desa agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan.

2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan atau organisasi atau entitas agar tujuan yang ditetapkan dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Tujuan pengendalian intern sesuai dalam kutipan dari buku Tunggal (2013:4) “*Standars For The Proffesional Practice Of Internal Auditing (sandard300), Scope Of Work, 5*” menyebutkan tujuan utama pengendalian intern yaitu guna meyakinkan keandalan dan integritas informasi, meyakinkan ketaatan dengan kebijakan dan rencana terhadap prosedur, hukum dan peraturan, meyakinkan pengamanan seluruh aktiva, meyakinkan pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien, meyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang telah ditetapkan. Tujuan sistem pengendalian intern (SPI) menurut Pujiono et al., (2016) yaitu meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern dalam perusahaan, maka dapat mencegah kerugian ataupun pemborosan pengelolaan suatu sumber daya perusahaan, selain itu dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman.

2.2.3.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur sistem pengendalian internal terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.

f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2.4.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Haag dan Keen (1996) menyatakan “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Martin (1999)

mengemukakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi atau data melainkan juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau data. Teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap atau memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, dan menyebarkan informasi tersebut serta sebagai sarana dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi tersebut Wansyah et al., (2009) dalam Komarasari (2017).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi oleh Haza (2015). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Komputer juga dapat mengerjakan hal yang mungkin tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sedangkan teknologi komunikasi atau teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, seperti telepon radio, televisi dan internet.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu peran sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi agar secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam pelayanan kepada

masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

2.2.4.2 Pengelompokan Teknologi Informasi

Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi yaitu: teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemroses (Kadir dan Triwahyuni, 2005:5).

1. Teknologi Masukan

Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Perangkat masukan yang sering dijumpai adalah *keyboard* dan *mouse*.

2. Mesin Pemroses

Mesin pemroses seperti CPU merupakan bagian dalam komputer yang menjadi pusat pengolahan data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut.

3. Teknologi Penyimpan

Teknologi penyimpan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpan eksternal. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilakukan oleh CPU. Penyimpan eksternal dikenal juga dengan sebutan penyimpan sekunder. Penyimpan sekunder adalah segala perangkat yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen.

4. Teknologi Keluaran

Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala perangkat yang berfungsi untuk mengajikan informasi hasil pengolahan sistem.

5. Teknologi Perangkat Lunak

6. Perangkat lunak atau dikenal juga dengan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya.

2.2.4.3 Komponen Sistem teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu *software*, dan yang lebih penting lagi adalah orang.

Komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa :

1. Perangkat keras (*hardware*),
2. Perangkat lunak (*software*), dan
3. Orang (*brainware*).

2.2.4.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi menurut Jurnal dan Supomo (2002), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini menjadi perhatian :

1. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja,
2. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja ,dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan,

3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi,
4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi

2.2.5. Profesionalitas

2.2.5.1 Pengertian Profesionalitas

Menurut Siagaan (2000:163) mengatakan bahwa profesionalitas merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Menurut Ancok (2000) profesionalitas adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi organisasi. Menurut Kartasasmita (1997:10) profesionalitas mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas profesinya.

Berdasarkan definisi profesionalitas menurut para ahli, dapat diartikan bahwa profesionalitas merupakan suatu kemampuan yang handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bisa diikuti masyarakat yang dilayaninya. Supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang. Tujuan tersebut agar bisa

melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki daya inovatif yang tinggi mengacu pada visi misi organisasi.

2.2.5.2 Asas Pokok Profesionalitas

Menurut Maskun (1997:7) bahwa suatu profesionalitas adalah merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok, yaitu :

- a. Terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai sesuatu teknik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya.
- c. Dikembangkan suatu sistem pengawasan atau usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik.

2.2.5.3 Indikator Profesionalitas

Menurut Morrow dan Goets (1998), indikator profesionalitas sebagai berikut :

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total terhadap pekerjaan.

Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar alat untuk mencapai pekerjaan. Sedangkan totalitas adalah merupakan komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material.

2. Kewajiban social (*social obligation*) pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalitas itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesionalitas harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*) yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan professional adalah rekan semua profesi bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*profesi community affiliation*) yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan ini.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, guna menjadi acuan dan pedoman dalam penelitian ini :

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	Umaira dan Adnan (2019)	Variabel Independen : a. Partisipasi Masyarakat b. Kompetensi Sumber Daya Manusia c. Pengawasan Variabel Dependem : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2.	Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)	Variabel Independen : a. Kompetensi Aparatur b. Komitmen Organisasi c. Partisipasi Masyarakat Variabel Dependem : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3.	Yesinia, Yuliarti, dan Puspitasari (2018)	Variabel Independen : a. Peran Kepala Desa b. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependem : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa peran kepala desa, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4.	Dewi dan Gayatri (2019)	Variabel Independen : a. Kompetensi Perangkat Desa b. Kepemimpinan c. Partisipasi Masyarakat Variabel Dependem : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi perangkat desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5.	Aziiz dan Prastiti (2019)	Variabel Independen : a. Kompetensi Aparatur	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi aparatur,

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
		b. Pemanfaatan Teknologi Informasi c. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Akuntabilitas Dana Desa	pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6.	Wardani dan Andriyani (2017)	Variabel Independen : a. Sumber Daya Manusia b. Pemanfaatan Teknologi Informasi c. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sumber daya manusia, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
7.	Perdana, Wahyu (2014)	Variabel Independen : a. Kompetensi Aparatur b. Komitmen Organisasi c. Partisipasi Masyarakat d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8.	Idward, Nadila (2017)	Variabel Independen : a. Kompetensi Sumber Daya Manusia b. Teknologi Informasi c. Akuntabilitas Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
9.	Kumalasari, Lisa (2018)	Variabel Independen : a. Partisipasi Masyarakat b. Kompetensi Aparat c. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
10.	Rivenbark, Roenigk, dan Allison (2010)	Variabel Independen : a. <i>Conceptualizing</i> Variabel Dependen : Pengelolaan Keuangan dalam Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa <i>conceptualizing</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pemerintah Daerah.
11.	Agrawal dan Ribot (2012)	Variabel Independen : a. <i>Accountability</i> b. <i>Decentralization</i> Variabel Dependen : Kinerja keuangan daerah	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa <i>accountability</i> dan <i>decentralization</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
12.	Widiyarta, Herawati, dan Anantawikrama (2017)	Variabel Independen : a. Kompetensi Aparatur b. Budaya Organisasi, c. <i>Whistleblowing</i> d. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, <i>whistleblowing</i> , sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa
13.	Wati, Sinarwati, dan Atmadja (2017)	Variabel Independen : a. Partisipasi Anggaran b. Komitmen Organisasi c. Budaya Organisasi	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran daerah. Selain itu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
		d. Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kesenjangan Anggaran Daerah	dalam penelitian ini juga ditemukan komitmen organisasi, budaya organisasi, pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kesenjangan anggaran daerah.
14.	Martini, Lianto, Hartati, Zulkifli, Widyastuti (2019)	Variabel Independen : a. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
15.	Tudikromo (2015)	Variabel Independen : a. Profesionalitas b. Penerapan Anggaran Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa profesionalitas dan penerapan anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
16.	Mutmainah dan Pramuka (2017)	Variabel Independen : a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Pertanggungjawaban e. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa perencanaan, pelaporan, dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4. Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa

Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012). Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai respon masyarakat karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Teori *Stewardship* oleh Donaldson et al (1991) menjelaskan bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapat pengaruh positif signifikan oleh partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian–penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian Mada et al., (2017) dan Umaira dan Adnan (2019).

Masyarakat dilibatkan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kontrol. Masyarakat juga melakukan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan tujuan melakukan tekanan dan tuntutan agar pengelolaan dana desa dapat digunakan dengan baik. Adanya tuntutan dan tekanan dari masyarakat mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa, seharusnya sebagai aparatur desa mampu

mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dengan cara yang baik dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Seseorang yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan membuat semakin baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut yang akan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan dalam berpartisipasi di masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang menganggap partisipasi itu tidak penting maka tingkat partisipasi masyarakat rendah dan akan membuat semakin buruk dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Ha₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern merupakan usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertib pada peraturan perundang-undangan (PP No.60, 2008). Faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern Widyatama et al., (2017). Pengendalian internal

merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. *Theory Stewardship* menjelaskan bahwa aparatur desa mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Sistem pengendalian intern memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mengkaji penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah Yesinia et al., (2018) dan Aziiz dan Prastiti (2019).

Akuntabilitas akan tercapai jika adanya kegiatan pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa yang diperoleh. Menurut Widyatama et al., (2017) secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk menghasilkan informasi laporan keuangan Pemda yang berkualitas. Sebuah organisasi yang telah menerapkan standar pengendalian internal, standar operasional dan segala prosedur yang baik ketika melakukan suatu pekerjaan pengelolaan dana desa akan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang telah tersusun dengan baik secara otomatis pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik karena telah memiliki *schedule* dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Sebaliknya, jika sebuah organisasi

belum menerapkan standar pengendalian internal ketika melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa akan mengalami kendala karena belum memiliki aturan yang telah ditetapkan.

Ha₂ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Setiap manajer ingin hasil yang terbaik untuk kepentingan organisasinya. Hal ini dijelaskan oleh teori *Stewardship* (Donaldson *et al*, 1991) bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil mereka untuk kepentingan organisasi. Instansi pemerintah desa yang prinsipalnya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Aparatur pengelola dana desa memiliki tujuan memberikan hasil yang baik untuk tugasnya dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat terpenuhi apabila aparatur pengelola dana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Teknologi informasi merupakan suatu sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi tersebut secara cepat dan mudah. Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam mengirimkan informasi dan data oleh Kadir dan Triwahyuni (2005:2). Teknologi informasi diharapkan dapat memudahkan pekerjaan setiap orang. Karyawan atau dalam pengelolaan dana desa merupakan

aparatur pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaannya.

Pengaruh positif signifikan diberikan oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian–penelitian tersebut diantaranya adalah Idward (2017) dan Aziiz dan Prastiti (2019).

Teknologi informasi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi dan membagikan informasi ini sangat memudahkan aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Sesama aparatur pemerintah desa dapat saling bertukar informasi tentang pengelolaan dana desa. Informasi yang didapat aparatur dirasa dapat membantu aparatur dalam menjalankan tugasnya. Teknologi yang mumpuni berupa komputer dan internet dapat memudahkan pengelolaan dana desa. Seseorang yang memiliki tingkat pemanfaatan teknologi informasi tinggi akan membuat semakin baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini akan menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan mendorong seseorang untuk mengaambil keputusan memanfaatkan teknologi informasi. Sebaliknya, jika teknologi informasi dalam suatu desa tidak dimanfaatkan dengan baik atau belum mumpuni, desa akan tertinggal dalam mendapatkan informasi dan diduga akan mengalami kendala dalam akuntabilitas pengelolalaan dana desa.

Ha₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.4 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi Adi (2007:27). *Theory Stewardship* oleh Donaldson *et al* (1991) menjelaskan bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik. Logika berpikir dalam hipotesis ini adalah akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh.

Muhamadong (2018) menyatakan bahwa profesionalitas sangat dibutuhkan untuk memberikan pengaruh agar masyarakat peduli dan berpartisipasi pada semua program yang ada di desa. Penelitian ini menguji peran profesionalitas aparatur desa dalam memperkuat hubungan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasannya adalah profesionalitas aparatur dapat memperkuat hubungan partisipasi masyarakat pada suatu organisasi, karena apabila aparatur mempunyai kemampuan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka dengan sendiri anggota organisasi maupun

masyarakat akan percaya dan rasa simpati akan timbul seiring berjalannya roda organisasi yang semakin baik. Profesionalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dengan demikian anggota organisasi maupun masyarakat yang memiliki rasa simpati dalam berpartisipasi yang baik pada pengelolaan dana desa diimbangi dengan profesionalitas aparatur desa yang tinggi maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ha₄ : Profesionalitas memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.5 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) dari *Treadway Commission* dalam Susanto (2013:95) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern oleh Widyatama et al., (2017). Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*.

Theory Stewardship (Donaldson *et al*, 1991) menjelaskan bahwa aparatur desa mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Logika berpikir dalam hipotesis ini adalah mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang berkualitas.

Penelitian ini menguji peran profesionalitas dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur yang mempunyai profesionalitas yang tinggi akan memperkuat hubungan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi baik pula. Apabila diimbangi dengan profesionalitas yang tinggi pada aparatur, maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Profesionalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, sehingga akan memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian sebuah organisasi yang telah menerapkan standar pengelolaan yang baik pada pengelolaan dana desa diimbangi dengan profesionalitas aparatur desa yang tinggi maka akan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ha₅ : Profesionalitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.6 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

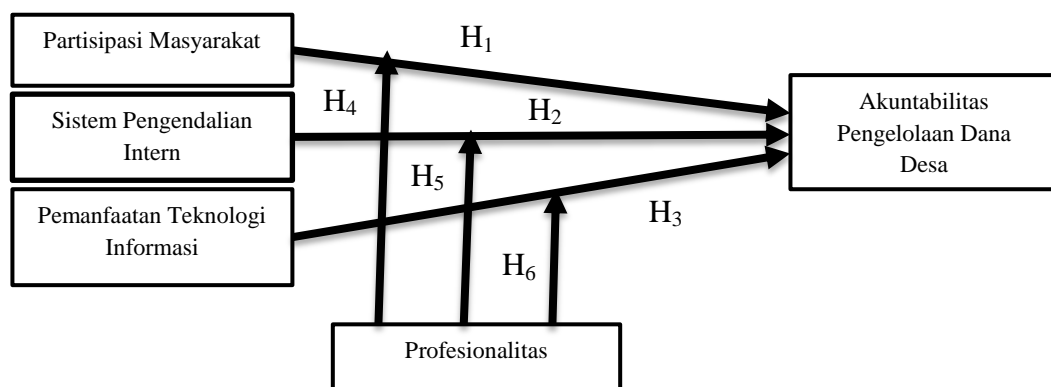
Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *Stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi para manajer yang tidak memiliki motivasi untuk tujuan-tujuan individu, akan tetapi para manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk mencapai cita-cita organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan dalam instansi pemerintah, salah satunya pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan orang yang kompeten dan mampu memanfaatkan teknologi informasi agar hasil dari pengelolaan dana desa sesuai dengan cita-cita aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang dapat memudahkan kerja karyawan ketika karyawan tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Seseorang dalam perusahaan atau dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Sebab dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, sumber daya manusia harus mengimbangi kemajuan tersebut.

Mayowan (2017) menyatakan bahwa profesionalitas mempunyai peran penting dalam pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah desa. Penelitian ini menguji peran profesionalitas dalam memperkuat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasannya adalah

profesionalitas dapat memperkuat pengaruh hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan suatu desa, karena apabila aparatur desa mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dengan kemampuan yang profesional dalam menjalankan tugasnya, maka dengan sendiri akuntabilitas pengelolaan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika aparatur desa merasa pemanfaatan teknologi itu tidak penting karena belum memiliki kemampuan yang cukup maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami keterlambatan.

Ha₆ : Profesionalitas memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah profesionalitas (M) memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat (X₁), sistem pengendalian intern (X₂), dan pemanfaatan teknologi informasi (X₃) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas sebagai variabel moderasi pada Aparatur Pengelola Dana Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Desain penelitian ini merujuk pada Teori Agensi yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Alasan memilih aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus karena berdasarkan *research gap* terdapat beberapa desa yang masih mengalami permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Responden berjumlah 64 orang yang terdiri dari 16 desa yang tersaji dalam Tabel 3.1 yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Pengelola Dana Desa di Kecamatan Kota

No.	Nama Desa	Total
1.	Nganguk	4
2.	Glantengan	4
3.	Kramat	4
4.	Mlati Lor	4
5.	Rendeng	4
6.	Burikan	4
7.	Barongan	4
8.	Kaliputu	4
9.	Singocandi	4
10.	Kauman	4
11.	Langgardalem	4
12.	Krandon	4
13.	Damaran	4
14.	Demaan	4
15.	Demangan	4
16.	Janggalan	4
Jumlah		64

Sumber : Data Kepegawaian Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) yang termasuk aparatur desa dalam mengelola dana desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi. Perangkat desa tersebut berkedudukan sebagai pembantu tugas Kepala Desa.

Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 responden sehingga semua aparatur pemerintah desa pengelola dana desa di Kecamatan Kota dijadikan sebagai responden. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan penjelasan

tersebut sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa pengelola dana desa di desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Variabel terikat atau variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pengelolaan alokasi dana desa dengan prosedur yang berlaku sesuai prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator yang merujuk dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan,
5. Pertanggungjawaban.

Variabel ini diukur menggunakan beberapa item yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan pengukurannya menggunakan skala *likert* dengan lima rentang yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.3.2 Partisipasi masyarakat (X₁)

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator yang merujuk dalam Heller *et al* (1984) dan Sujarweni (2015), sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan, misalnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa.
- b. Penyusunan anggaran, misalnya mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna.
- c. Pelaksanaan anggaran, misalnya terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, memberikan penghargaan.

Variabel ini diukur menggunakan beberapa item yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan pengukurannya menggunakan skala *likert* dengan lima rentang yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.3.3 Sistem Pengendalian Intern (X₂)

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator yang merujuk dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian.
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan pengendalian internal.

Variabel ini diukur menggunakan beberapa item yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan pengukurannya menggunakan skala *likert* dengan lima rentang yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu peran sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi tersebut secara cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator yang merujuk dalam Jurnal dan Supomo (2002), sebagai berikut:

1. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja,
2. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan,
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi,
4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Variabel ini diukur menggunakan beberapa item yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan pengukurannya menggunakan skala *likert* dengan lima rentang yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.3.5 Profesionalitas (M)

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu profesionalitas. Profesionalitas merupakan sebuah keahlian yang dimiliki oleh

seseorang terkait dengan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki. Seorang individu yang memegang jabatan atau kedudukan tertentu dituntut memiliki profesionalitas yang tinggi agar dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan secara efektif. Profesionalitas dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator yang merujuk Morrow dan Goets (1998), sebagai berikut :

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*),
2. Kewajiban social (*social obligation*),
3. Kemandirian (*autonomy demands*),
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*),
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*).

Variabel ini diukur menggunakan beberapa item yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan pengukurannya menggunakan skala *likert* dengan lima rentang yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh dan memperkuat data adalah melalui kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung. Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pernyataan yang

merupakan penjabaran dari indikator-indikator variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sitem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan. Kuesioner dalam penelitian ini disebarakan kepada aparatur pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Seksi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

3.5. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan sebelum kuesioner atau angket dibagikan kepada responden. Pengujian instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuan dari uji instrumen yaitu agar instrumen yang akan diberikan kepada responden teruji valid dan reliabel. Hal yang diharapkan yaitu responden memahami instrumen tersebut, dan tidak menemui kesulitan dalam menangkap maksud peneliti. Uji coba instrumen ini menggunakan program *Statistical Package For Social Science (SPSS)* Versi 23.0. Uji coba instrumen dilakukan kepada 32 aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pengukuran variabel dilakukan dengan memberikan skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan ketentuan yang sudah ada. Pengukuran variabel penelitian menggunakan skala *likert* 1-5 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No.	Kategori	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
1.	Sangat Tinggi	5	1
2.	Tinggi	4	2
3.	Sedang	3	3
4.	Rendah	2	4
5.	Sangat Rendah	1	5

Sumber : Sugiyono, 2015

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan atau kesalihan instrumen. Hasil penelitian akan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek diteliti. Uji validitas dilakukan menggunakan program aplikasi *SPSS* versi 23.0. Penguji menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 5% berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pengujian 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka item dinyatakan pernyataan dari instrumen penelitian berkorelasi secara signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pengujian 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka item dinyatakan pernyataan dari instrument penelitian tidak berkorelasi secara signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji coba kuesioner dilakukan terhadap 32 responden aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Berdasarkan uji coba penelitian yang sudah dilakukan pada 8 desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus maka diperoleh hasil validitas instrumen. Uji coba instrumen kuesioner penelitian pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan profesionalitas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
1.	Perencanaan	1	0,409	Valid	Digunakan
		2	0,710	Valid	Digunakan
		3	0,677	Valid	Digunakan
		4	0,734	Valid	Digunakan

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
2.	Pelaksanaan	5	0,491	Valid	Digunakan
		6	0,490	Valid	Digunakan
		7	0,456	Valid	Digunakan
		8	0,862	Valid	Digunakan
		9	0,336	Tidak Valid	Tidak Digunakan
3.	Penatausahaan	10	0,821	Valid	Digunakan
		11	0,910	Valid	Digunakan
		12	0,910	Valid	Digunakan
		13	0,780	Valid	Digunakan
		14	0,756	Valid	Digunakan
		15	0,857	Valid	Digunakan
		16	0,756	Valid	Digunakan
4.	Pelaporan	17	0,534	Valid	Digunakan
		18	0,606	Valid	Digunakan
		19	0,702	Valid	Digunakan
5.	Pertanggungjawaban	20	0,697	Valid	Digunakan
		21	0,910	Valid	Digunakan
		22	0,778	Valid	Digunakan
		23	0,637	Valid	Digunakan
		24	0,640	Valid	Digunakan
		25	0,710	Valid	Digunakan

Sumber : data penelitian diolah 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 dari 25 pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diajukan pada 32 responden dengan r_{tabel} 0,349 terdapat satu pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 9, hal ini dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ sehingga satu item pernyataan tersebut harus dibuang atau tidak digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas pada tabel 3.4 menyatakan hanya ada 24 pernyataan yang dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga 24 item pernyataan tersebut dapat digunakan dan layak untuk mewakili variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa pada penelitian ini.

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
1.	Pengambilan Keputusan	26	0,519	Valid	Digunakan
		27	0,707	Valid	Digunakan
		28	0,566	Valid	Digunakan
2.	Penyusunan Anggaran	29	0,756	Valid	Digunakan
		30	0,649	Valid	Digunakan
		31	0,756	Valid	Digunakan
3.	Pelaksanaan Anggaran	32	0,761	Valid	Digunakan
		33	0,670	Valid	Digunakan
		34	0,696	Valid	Digunakan

Sumber : Data penelitian diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3.4, menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan pada variabel partisipasi masyarakat yang diajukan kepada 32 responden dengan r_{tabel} 0,349 dinyatakan valid. Item pernyataan yang termuat dalam variabel tersebut memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga tidak ada item pernyataan yang dibuang. Variabel partisipasi masyarakat memiliki 9 pernyataan yang secara keseluruhan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk kuesioner penelitian ini. Data hasil uji validitas variabel sistem pengendalian intern telah disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian	35	0,669	Valid	Digunakan
		36	0,498	Valid	Digunakan
		37	0,334	Tidak Valid	Tidak Digunakan
		38	0,349	Tidak Valid	Tidak Digunakan
		39	0,493	Valid	Digunakan
		40	0,753	Valid	Digunakan
		41	0,769	Valid	Digunakan
		42	0,696	Valid	Digunakan
		43	0,688	Valid	Digunakan
44	0,767	Valid	Digunakan		

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
2.	Penilaian Risiko	45	0,730	Valid	Digunakan
		46	0,631	Valid	Digunakan
		47	0,683	Valid	Digunakan
3.	Kegiatan Pengendalian	48	0,461	Valid	Digunakan
		49	0,462	Valid	Digunakan
		50	0,456	Valid	Digunakan
		51	0,746	Valid	Digunakan
		52	0,588	Valid	Digunakan
		53	0,604	Valid	Digunakan
		54	0,708	Valid	Digunakan
4.	Informasi dan Komunikasi	55	0,374	Valid	Digunakan
		56	0,395	Valid	Digunakan
		57	0,498	Valid	Digunakan
		58	0,596	Valid	Digunakan
		59	0,664	Valid	Digunakan
5.	Pemantauan Pengendalian Internal	60	0,652	Valid	Digunakan
		61	0,723	Valid	Digunakan
		62	0,637	Valid	Digunakan

Sumber : Data penelitian diolah 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 dari 28 pernyataan variabel sistem pengendalian intern yang diajukan pada 32 responden dengan r_{tabel} 0,349 terdapat dua pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 37 dan 38, hal ini dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ sehingga satu item pernyataan tersebut harus dibuang atau tidak digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas pada tabel 3.6 menyatakan hanya ada 26 pernyataan yang dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga 26 item pernyataan tersebut dapat digunakan dan layak untuk mewakili variabel sistem pengendalian intern pada penelitian ini. Hasil uji validitas variabel pemanfaatan teknologi informasi telah disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
1.	Jaringan Internet	63	0,428	Valid	Digunakan
		64	0,337	Tidak Valid	Tidak Digunakan
		65	0,653	Valid	Digunakan
2.	Pemanfaatan Jaringan Komputer	66	0,717	Valid	Digunakan
		67	0,696	Valid	Digunakan
		68	0,719	Valid	Digunakan
3.	Pencatatan Secara Komputerisasi	69	0,603	Valid	Digunakan
		70	0,603	Valid	Digunakan
		71	0,346	Tidak Valid	Tidak Digunakan
		72	0,698	Valid	Digunakan
4.	Pengelolaan dengan Software Sesuai UU	73	0,710	Valid	Digunakan
		74	0,758	Valid	Digunakan
		75	0,644	Valid	Digunakan
5.	Laporan Akuntansi dan Manajerial Dihasilkan Terintegrasi	76	0,652	Valid	Digunakan
		77	7,736	Valid	Digunakan
		78	0,472	Valid	Digunakan

Sumber : Data penelitian diolah 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 dari 16 pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diajukan pada 32 responden dengan r_{tabel} 0,349 terdapat dua pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 64 dan 71, hal ini dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ sehingga satu item pernyataan tersebut harus dibuang atau tidak digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas pada Tabel 3.7 menyatakan hanya ada 14 pernyataan yang dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga 14 item pernyataan tersebut dapat digunakan dan layak untuk mewakili variabel sistem pengendalian intern pada penelitian ini. Hasil uji validitas variabel profesionalitas telah disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalitas

No.	Indikator	No. Item	r_{hitung}	Kriteria	Keterangan
1.	Pengabdian Pada Profesi	79	0,503	Valid	Digunakan
		80	0,690	Valid	Digunakan
		81	0,646	Valid	Digunakan
2.	Kewajiban Sosial	82	0,473	Valid	Digunakan
		83	0,731	Valid	Digunakan
		84	0,787	Valid	Digunakan
3.	Kemandirian	85	0,769	Valid	Digunakan
		86	0,837	Valid	Digunakan
		87	0,819	Valid	Digunakan
4.	Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi	88	0,594	Valid	Digunakan
		89	0,541	Valid	Digunakan
		90	0,622	Valid	Digunakan
5.	Hubungan dengan Sesama Profesi	91	0,574	Valid	Digunakan
		92	0,702	Valid	Digunakan
		93	0,630	Valid	Digunakan

Sumber : Data penelitian diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3.7, menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan pada variabel profesionalitas yang diajukan kepada 32 responden dengan r_{tabel} 0,349 dinyatakan valid. Item pernyataan yang termuat dalam variabel tersebut memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga tidak ada item pernyataan yang dibuang. Variabel profesionalitas memiliki 15 pernyataan yang secara keseluruhan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk kuesioner penelitian ini.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil atau terdapat kesamaan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian yang reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas pada instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program

SPSS versi 23.0 dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,70$.

Tabel 3.8
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	Kriteria $> 0,70$	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,959	0,7	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,891	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,939	0,7	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,959	0,7	Reliabel
Profesionalitas	0,924	0,7	Reliabel

Sumber : Data penelitian diolah 2020

Tabel 3.8 menunjukkan data bahwa *cronbach's alpha* pada masing-masing lebih dari 0,70. Item pernyataan yang mewakili variabel penelitian ini sudah memenuhi kriteria reliabel. Hal ini dapat diartikan bahwa instrumen tersebut reliabel untuk dijadikan instrumen penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian untuk memperoleh kesimpulan atau hasil. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputerisasi program SPSS versi 23.0, yaitu suatu program pengolah data yang dapat memproses data statistik secara tepat, cepat dan akurat sesuai dengan hasil yang dikehendaki.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai responden penelitian.

Menganalisis data secara deskriptif dapat mempresentasikan hasil yang ringkas, sederhana dan lebih mudah dimengerti. Analisis statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Gambaran data yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan distributif frekuensi dari masing-masing variabel.

a) Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Jumlah kelas sesuai dengan jumlah skala likert pada penelitian yaitu 5.
2. Rentang data

Skor nilai maksimal adalah $24 \text{ (jumlah soal)} \times 5 \text{ (skor maksimal)} = 120$

Skor nilai minimal adalah $24 \text{ (jumlah soal)} \times 1 \text{ (skor minimal)} = 24$

Rentang data adalah $120 \text{ (skor maksimal)} - 24 \text{ (skor minimal)} = 96$

3. Menghitung panjang kelas dengan rumus :

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah kelas}} \quad \text{maka} \quad p = \frac{96}{5} = 19,2 \text{ dibulatkan menjadi } 19$$

Tabel 3.9

Jenjang Kriteria Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Interval	Kriteria
1	100-118	Sangat Tinggi
2	81-99	Tinggi
3	62-80	Cukup
4	43-61	Rendah
5	24-42	Sangat Rendah

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

b) Kategori Variabel Partisipasi Masyarakat

1. Jumlah kelas sesuai dengan jumlah skala likert pada penelitian yaitu 5.

2. Rentang data

Skor nilai maksimal adalah $9 \text{ (jumlah soal)} \times 5 \text{ (skor maksimal)} = 45$

Skor nilai minimal adalah $9 \text{ (jumlah soal)} \times 1 \text{ (skor minimal)} = 9$

Rentang data adalah $45 \text{ (skor maksimal)} - 9 \text{ (skor minimal)} = 36$

3. Menghitung panjang kelas dengan rumus :

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah kelas}} \quad \text{maka} \quad p = \frac{36}{5} = 7,2 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Tabel 3.10**Jenjang Kriteria Variabel Partisipasi Masyarakat**

No.	Interval	Kriteria
1	36-42	Sangat Tinggi
2	29-35	Tinggi
3	23-28	Cukup
4	16-22	Rendah
5	9-15	Sangat Rendah

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

c) Kategori Variabel Sistem Pengendalian Intern

1. Jumlah kelas sesuai dengan jumlah skala likert pada penelitian yaitu 5.

2. Rentang data

Skor nilai maksimal adalah $26 \text{ (jumlah soal)} \times 5 \text{ (skor maksimal)} = 130$

Skor nilai minimal adalah $26 \text{ (jumlah soal)} \times 1 \text{ (skor minimal)} = 26$

Rentang data adalah $130 \text{ (skor maksimal)} - 26 \text{ (skor minimal)} = 104$

3. Menghitung panjang kelas dengan rumus :

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah kelas}} \quad \text{maka} \quad p = \frac{104}{5} = 20,8 \text{ dibulatkan menjadi } 21$$

Tabel 3.11**Jenjang Kriteria Variabel Sistem Pengendalian Intern**

No.	Interval	Kriteria
1	110-130	Sangat Baik
2	89-109	Baik
3	68-88	Cukup
4	47-67	Kurang Baik
5	26-46	Tidak Baik

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

d) Kategori Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Jumlah kelas sesuai dengan jumlah skala likert pada penelitian yaitu 5.

2. Rentang data

Skor nilai maksimal adalah 14 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 70

Skor nilai minimal adalah 14 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 14

Rentang data adalah 70 (skor maksimal) - 14 (skor minimal) = 56

3. Menghitung panjang kelas dengan rumus :

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah kelas}} \quad \text{maka} \quad p = \frac{56}{5} = 11,2 \text{ dibulatkan menjadi } 11$$

Tabel 3.12

Jenjang Kriteria Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Interval	Kriteria
1	58-68	Sangat Tinggi
2	47-57	Tinggi
3	36-46	Cukup
4	25-35	Rendah
5	14-24	Sangat Rendah

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

e) Kategori Variabel Profesionalitas

1. Jumlah kelas sesuai dengan jumlah skala likert pada penelitian yaitu 5.

2. Rentang data

Skor nilai maksimal adalah 15 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 75

Skor nilai minimal adalah 15 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 15

Rentang data adalah 75 (skor maksimal) - 15 (skor minimal) = 60

3. Menghitung panjang kelas dengan rumus :

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah kelas}} \quad \text{maka} \quad p = \frac{60}{5} = 12 \text{ dibulatkan menjadi } 12$$

Tabel 3.13

Jenjang Kriteria Variabel Profesionalitas

No.	Interval	Kriteria
1	62-73	Sangat Tinggi
2	50-61	Tinggi
3	39-49	Cukup
4	27-38	Rendah
5	15-26	Sangat Rendah

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

3.6.2 Analisis Uji Regresi Moderasi

3.6.2.1 Uji Prasyarat

3.6.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji distribusi normal dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual. Uji normalitas dilakukan pada variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa akan layak digunakan apabila bebas dari bias dan berdistribusi normal. Normalitas data dapat diketahui dengan melakukan uji t dan uji F. Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji statistik melalui *SPSS* versi 23.0 dengan melihat nilai *Monte Carlo*. Data dikatakan normal apabila nilai dari *Monte Carlo* $> \alpha$ (0,05), apabila nilai *Monte Carlo* $< \alpha$ (0,05) maka data dikatakan tidak normal.

3.6.2.1.2 Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Uji linearitas akan menghasilkan informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Hal ini untuk mengetahui apakah antara variabel X dan variabel Y memiliki hubungan linear atau tidak. Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji *lagrange multiplier* yang dapat dilihat pada *output* program aplikasi *SPSS* versi 23.0 dalam kolom *R Square* untuk

menghitung c^2 hitung ($n \times R \text{ Square}$) kemudian dibandingkan dengan c^2 tabel. Model dikatakan linier apabila c^2 hitung $< c^2$ tabel.

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adakah kolerasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi penelitian. Model regresi yang baik adalah jika diantara variabel independen tidak terjadi kolerasi yang signifikan. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Pengujian multikolonieritas dengan menggunakan aplikasi *SPSS* versi 23.0 dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Variabel bebas dikatakan tidak memiliki hubungan atau variabel bebas multikolonieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

3.6.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. *Variance* yang tetap maka dikatakan homoskedastisitas, apabila *variance* berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji gletser dengan *SPSS* versi 23.0. Variabel dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $>0,05$.

3.6.2.3 Uji Nilai Selisih Mutlak

Hipotesis penelitian pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi antara hipotesis partisipasi masyarakat

dengan profesionalitas, sistem pengendalian intern dengan profesionalitas dan pemanfaatan teknologi informasi dengan profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diuji melalui uji selisih mutlak. Uji nilai selisih mutlak dipilih untuk menghindari masalah multikolinearitas, seperti yang terjadi pada uji interaksi. Masalah multikolonieritas dapat terjadi pada uji interaksi melalui hubungan interaksi yang sangat tinggi diantara variabel independen dan variabel moderasi, sehingga penelitian ini lebih memilih menggunakan uji nilai selisih mutlak untuk menghindari hal tersebut.

Uji selisih mutlak dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *SPSS versi 23.0*. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dianggap dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen apabila variabel selisih mutlak antara variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi memiliki angka signifikan. Uji selisih mutlak dalam penelitian dilakukan dengan cara :

1. Membuat persamaan regresi yang pertama yaitu dengan mencari nilai *standardize* variabel independen dan variabel moderasi moderasi
2. Langkah kedua adalah mencari nilai selisih mutlak variabel independen yang sudah terstandarisasi dengan variabel moderasi yang sudah terstandarisasi menggunakan menu *transform*.
3. Langkah selanjutnya adalah meresgresikan variabel independen yang sudah terstandarisasi dengan variabel selisih mutlak yang sudah terstandarisasi.

Persamaan regresi nilai selisih mutlak sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_5 |X_1 - M| + \beta_6 |X_2 - M| + \beta_7 |X_3 - M| + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standard Error

X_1 = Nilai *Standardized* dari Partisipasi Masyarakat

X_2 = Nilai *Standardized* dari Sistem Pengendalian Intern

X_3 = Nilai *Standardized* dari Pemanfaatan Teknologi Informasi

M = Nilai *Standardized* dari Profesionalitas

$|X_1-M|$ = Nilai Absolut dari $ZscoreX_1 - ZscoreM$

$|X_2-M|$ = Nilai Absolut dari $ZscoreX_2 - ZscoreM$

$|X_3-M|$ = Nilai Absolut dari $ZscoreX_3 - ZscoreM$

3.6.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi nilai statistik F dan nilai statistik t.

3.6.2.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar keputusan pada uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) pada hasil output

SPSS di tabel *Coefficiency*. Perhitungan variabel yang menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

3.6.2.4.2. Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2)

Koefisien determinasi secara parsial (r^2) digunakan untuk besaran kontribusi yang diberikan masing-masing prediktor secara parsial, yaitu variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa melalui variabel tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dengan taraf signifikansi 5%. Nilai koefisiensi determinasi secara parsial (r^2) dapat dicari dengan menggunakan program *SPSS* versi 23.0. Cara untuk melakukan uji parsial yaitu pada tabel *coefficients*, nilai *correlations-partial* dalam tabel tersebut dikuadratkan, kemudian diubah kedalam bentuk persentase.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kecamatan Kota Kudus adalah salah satu kecamatan dari 9 kecamatan yang terletak di Kabupaten Kudus. Luas wilayah Kecamatan Kota pada tahun 2019 tercatat 1047 Ha atau setara dengan 2,46% dari luas Kabupaten Kudus 42.516 Ha. Secara administratif Kecamatan Kota terbagi menjadi 98 dusun, 490 RT, dan 110 RW.

Letak Kecamatan ini berada di bagian paling barat Kabupaten Kudus. Kecamatan Kota. Batas wilayah Kecamatan Kota di sebelah utara adalah Kecamatan Dawe, di sebelah selatan adalah Kecamatan Jati, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jekulo, sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaliwungu. Kecamatan Kota memiliki 16 Desa, yaitu: Demangan, Janggalan, Mlati Lor, Nganguk, Kramat, Demaan, Langgar Dalem, Kauman, Damaran, Krandon, Singocandi, Glantengan, Barongan, Kaliputu, Burikan, dan Rendeng.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berada dibawah administrasi pemerintahan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berjumlah 64 orang. Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa yang menjadi responden penelitian ini terdiri dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan Kepala

Seksi yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (kaur kesra) di seluruh desa pada Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti mulai tanggal 9 Maret 2020 hingga tanggal 30 Maret 2020. Kuesioner disebar di seluruh desa di Kecamatan Kota dimana setiap desa mendapat empat kuesioner. Penelitian ini menghimpun sebanyak 64 kuesioner. Adapun rincian jumlah kuesioner penelitian yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner yang Dihimpun

No.	Nama Desa	Kuesioner dibagikan	Kuesioner diterima
1.	Nganguk	4	4
2.	Glantengan	4	4
3.	Kramat	4	4
4.	Mlati Lor	4	4
5.	Rendeng	4	4
6.	Burikan	4	4
7.	Barongan	4	4
8.	Kaliputu	4	4
9.	Singocandi	4	4
10.	Kauman	4	4
11.	Langgardalem	4	4
12.	Krandon	4	4
13.	Damaran	4	4
14.	Demaan	4	4
15.	Demangan	4	4
16.	Janggalan	4	4
Jumlah		64	64

Sumber: data penelitian diolah, 2020

Total kuesioner yang disebar di seluruh desa sebanyak 64 orang, seluruh kuesioner tersebut berhasil yaitu sebanyak 64 kuesioner (100%). Jumlah tersebut dibagikan dan diisi oleh perangkat desa yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan

dana desa di Kecamatan Kota. Adapun penjelasan mengenai tingkat penyebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tingkat Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dibagikan	64	100%
Kuesioner yang diperoleh	64	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah menjadi sampel	64	100%

Sumber: data penelitian diolah, 2020

4.1.2 Analisis Statistik Diskriptif

4.1.2.1 Diskripsi Responden

Analisis diskriptif responden dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran mengenai keadaan diri dari responden dan menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini. Analisis responden dari penelitian ini berdasarkan identitas responden pada kuesioner yang terdiri dari jenis kelamin, usia responden, tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja yang diambil dari 64 kuesioner yang didapatkan. Data identitas responden disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Diskripsi Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	41	64,06%
2. Perempuan	23	35,94%
Total	64	100%
Usia Responden		
1. 21-30 tahun	4	6,25%
2. 31-40 tahun	11	17,18%
3. 41-50 tahun	29	45,31%
4. >50 tahun	20	31,25%
Total	64	100%
Tingkat Pendidikan		
1. SMA/SMK	41	64,06%
2. D3	4	6,25%

Keterangan	Jumlah	Presentase
3. S1	18	28,13%
4. S2	1	1,56%
Total	64	100%
Jabatan		
1. Kepala Desa	16	25%
2. Sekretaris Desa	16	25%
3. Bendahara Desa	16	25%
4. Kepala Seksi	16	25%
Total	64	100%
Masa Kerja		
1. 1-5 tahun	5	7,81%
2. 5-10 tahun	24	37,5%
3. 11-15 tahun	15	23,44%
4. >15 tahun	20	31,25%
Total	64	100%

Sumber: data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa aparat desa yang memiliki tanggungjawab dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa didominasi oleh laki-laki. Data menunjukkan bahwa sebanyak 41 responden atau setara dengan 64,06% yang mengelola dana desa adalah laki-laki. Responden yang tersisa adalah sebanyak 23 orang atau setara dengan 35,94% adalah perempuan.

Berdasarkan Tabel 4.3 jika dilihat dari data usia responden dapat diketahui bahwa hampir sebagian dari jumlah responden berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 45,31%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa responden yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 20 tahun atau sebesar 31,25%. Berbanding terbalik dengan angka tersebut, ternyata responden yang berusia muda antara 21-30 tahun hanya berjumlah 4 orang atau sebesar 6,25%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata usia aparatur desa sudah cukup matang dalam mengelola dana desa.

Data tingkat pendidikan yang disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh aparatur desa dengan tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 64,06%. Responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 juga terhitung banyak yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 28,13%. Hal ini membuktikan bahwa aparat desa telah memiliki pendidikan yang cukup.

Berdasarkan masa kerja aparatur desa yang bertanggungjawab dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa didominasi dengan pengalaman lebih dari 5 tahun menjabat. Data mengenai informasi responden penelitian ini menunjukkan bahwa yang memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 37,5%, aparat desa yang menjabat selama 11-15 tahun sebanyak 15 orang atau sebanyak 23,44%, sedangkan aparatur dengan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 31,25%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sebagian responden dari penelitian memiliki masa kerja yang cukup lama antara 5 tahun hingga lebih dari 15 tahun.

Data informasi tentang jabatan responden dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa hampir di setiap desa menyerahkan tanggungjawab pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Jumlah rata-rata responden sesuai dengan jabatan yang ditetapkan hampir sama yaitu sebesar 16 orang responden atau setara dengan 25%. Hal ini membuktikan bahwa tanggungjawab yang dimiliki semua responden itu sama dalam mengelola dana desa.

4.1.2.2 Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel memberikan gambaran data yang diperoleh mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan distribusi masing-masing variabel penelitian. Deskripsi variabel penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Data penelitian ini didapatkan dari penyebaran kuesioner yang diolah dengan *SPSS Statistic 23.0*. Hasil pengolahan data disertai penjelasan analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dipaparkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APDD	64	67	120	92.81	18.927
Valid N (listwise)	64				

Sumber: *output SPSS Statistic 23*, data diolah 2020

Hasil analisis statistik deskriptif variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan *output SPSS Statistic 23.0* yang disajikan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai minimum responden dari jawaban kuesioner sebesar 67 dan nilai *maximum* sebesar 120. Nilai *mean* sebesar 92,81 dan nilai standar deviasi atau penyebaran data sebesar 18,927. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, nilai *mean* yang tinggi menunjukkan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Berikut distribusi frekuensi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5**Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	100-118	29	45,31%	Sangat Tinggi	92,81
2	81-99	35	54,69%	Tinggi	
3	62-80	0	0%	Cukup	
4	43-61	0	0%	Rendah	
5	24-42	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

Sumber: data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan data Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 35 orang atau sebesar 54,69% aparatur desa mempersepsikan bahwa dirinya memiliki akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tinggi pada saat mengelola dana desa, kemudian 29 responden atau sebesar 45,31% menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kategori sangat tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner responden sebesar 92,81 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur dengan 4 indikator yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengujian indikator dirinci dengan analisis deskriptif indikator. Berikut hasil pengujian indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6**Analisis Deskriptif Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

No.	Indikator	Mean	Kriteria
1.	Perencanaan	14,97	Tinggi
2.	Pelaksanaan	15,11	Tinggi
3.	Penatausahaan	26,42	Tinggi
4.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	36,28	Tinggi

Sumber: data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator perencanaan berada pada kriteria tinggi sesuai dengan rata-rata 14,97. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah memiliki nilai yang tinggi. Indikator pelaksanaan berada pada kriteria tinggi sesuai dengan rata-rata 15,11. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah memiliki nilai yang tinggi. Indikator penatausahaan berada pada kriteria tinggi sesuai dengan rata-rata 26,42. Hasil ini menunjukkan bahwa penatausahaan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah memiliki nilai tinggi. Indikator pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki kriteria tinggi sesuai dengan nilai rata-rata 36,28. Hasil ini berarti pelaporan dan pertanggungjawaban dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah tinggi.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM	64	25	45	34.83	5.808
Valid N (listwise)	64				

Sumber: *output SPSS Statistic 23*, data diolah 2020

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil dari 64 responden menunjukkan bahwa nilai minimum responden dari jawaban kuesioner sebesar 25 dan nilai *maximum* sebesar 45. Nilai *mean* sebesar 34,83 dan nilai standar deviasi atau penyebaran data sebesar 5,808. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dibandingkan dengan nilai standar standar deviasi, nilai *mean* yang tinggi menunjukkan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Berikut distribusi frekuensi variabel partisipasi masyarakat yang telah disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	36-42	31	48,44%	Sangat Tinggi	34,83
2	29-35	33	51,56%	Tinggi	
3	23-28	0	0%	Cukup	
4	16-22	0	0%	Rendah	
5	9-15	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

Sumber: data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat 33 orang atau sebesar 51,56% aparatur desa yang mempersepsikan bahwa instansi atau pemerintahan desa tempat mereka bekerja memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi. Terdapat juga aparatur desa sebanyak 31 orang atau 48,44% yang mempersepsikan bahwa pemerintahan desa tempat mereka memiliki partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori tinggi, artinya aparatur desa dalam penelitian ini menganggap instansi mereka dalam mengelola dana desa menerapkan partisipasi masyarakat yang baik. Instansi yang memiliki partisipasi masyarakat yang baik akan mendorong aparatur desa yang terlibat untuk bersungguh-sungguh dalam mengurus dana desa dengan jujur sehingga program dana desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diukur dengan 3 indikator. Pengukuran indikator dirinci dengan jelas dalam analisis deskriptif indikator. Berikut analisis deskriptif indikator variabel partisipasi masyarakat yang telah disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9**Analisis Deskriptif Indikator Variabel Partisipasi Masyarakat**

No.	Indikator	Mean	Kriteria
1.	Pengambilan keputusan	12	Sangat Tinggi
2.	Penyusunan anggaran	11,11	Sangat Tinggi
3.	Pelaksanaan anggaran	15,47	Sangat Tinggi

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa indikator pengambilan keputusan pada variabel ini memiliki nilai rata-rata 12 pada kategori sangat tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Kota dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan aparatur desa saja bahkan melibatkan masyarakat desa setempat. Indikator penyusunan anggaran pada variabel ini memiliki rata-rata 11,11 pada kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Kota dalam penyusunan anggaran terkait pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan aparatur desa saja bahkan melibatkan masyarakat desa setempat. Indikator pelaksanaan anggaran pada variabel ini memiliki nilai rata-rata 15,47 pada kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Kota dalam pelaksanaan anggaran terkait pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan aparatur desa saja bahkan masyarakat desa ikut terlibat.

Tabel 4.10**Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	64	72	130	103.02	14.612
Valid N (listwise)	64				

Sumber: *output SPSS Statistic 23*, data diolah 2020

Hasil analisis statistik deskriptif tentang sistem pengendalian intern yang disajikan pada Tabel 4.10 berdasarkan *SPSS Statistic 23.0* menunjukkan bahwa nilai minimum responden dari jawaban kuesioner sebesar 72 dan *maximum* sebesar 130. Nilai *mean* sebesar 103,02 dan nilai standar deviasi atau penyebaran data sebesar 14,612. Berikut distribusi frekuensi variabel sistem pengendalian intern:

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	110-130	21	32,81%	Sangat Baik	103,02
2	89-109	29	45,31%	Baik	
3	68-88	14	21,88%	Cukup	
4	47-67	0	0%	Kurang Baik	
5	26-46	0	0%	Tidak Baik	
Total		64	100%	Baik	

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern di desa se-Kecamatan Kota dalam kategori baik yaitu sejumlah 29 responden atau sebesar 45,31% kemudian 21 responden atau sebesar 32,81% menunjukkan sistem pengendalian intern dalam kategori sangat baik, 14 responden atau sebesar 21,88% menunjukkan sistem pengendalian intern dalam kategori cukup. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner responden 103,02 yang termasuk dalam kategori baik.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 5 indikator yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal. Berikut hasil pengujian indikator sistem pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Analisis Deskriptif Indikator Variabel Sistem Pengendalian Intern

No.	Indikator	Mean	Kriteria
1.	Lingkungan pengendalian	32,25	Sangat Baik
2.	Penilaian risiko	12,25	Sangat Baik
3.	Kegiatan pengendalian	27,23	Sangat Baik
4.	Informasi dan komunikasi	19,56	Baik
5.	Pemantauan pengendalian internal	15,41	Sangat Baik

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis deskriptif dari indikator variabel sistem pengendalian intern. Indikator lingkungan pengendalian menunjukkan kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 32,25. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota memiliki lingkungan pengendalian yang sangat baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator penilaian risiko menunjukkan kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 12,25. Hal ini menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa memiliki penilaian risiko yang sangat baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator kegiatan pengendalian menunjukkan kriteria sangat baik yang memiliki rata-rata 27,23. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian dengan sangat baik terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator informasi dan komunikasi menunjukkan kriteria baik dengan nilai rata-rata 19,56. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah desa dapat memberikan informasi dan komunikasi secara baik dalam bentuk dan waktu yang tepat. Indikator pemantauan pengendalian intern menunjukkan kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 15,41. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah sangat baik.

Tabel 4.13
Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTI	64	37	70	55.34	9.214
Valid N (listwise)	64				

Sumber: *output SPSS Statistic 23*, data diolah 2020

Hasil analisis statistik deskriptif variabel pemanfaatan teknologi informasi disajikan dalam *output SPSS Statistic 23.0* pada Tabel 4.13 dengan nilai minimum sebesar 37 dan nilai *maximum* sebesar 70. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki memiliki nilai *mean* sebesar 55,34 dan nilai standar deviasi atau penyebaran data sebesar 9,214. Analisis statistik deskriptif variabel dijabarkan dalam tabel distribusi frekuensi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	58-68	28	43,75%	Sangat Tinggi	55,34
2	47-57	29	45,31%	Tinggi	
3	36-46	7	10,94%	Cukup	
4	25-35	0	0%	Rendah	
5	14-24	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%		Tinggi

Sumber : Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di desa di Kecamatan Kota dalam kategori tinggi yaitu sejumlah 29 responden data sebesar 45,31%, kemudian 28 responden 43,75% menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kategori sangat tinggi dan 7 responden atau sebesar 10,94% menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam

kategori cukup. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner responden sebesar 55,34 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan 5 indikator yaitu: jaringan internet telah terpasang di unit kerja, jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi. Berikut hasil pengujian indikator pemanfaatan teknologi informasi:

Tabel 4.15
Analisis Diskriptif Indikator Variabel Pemanfaatan teknologi Informasi

No.	Indikator	Mean	Kriteria
1.	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.	8,31	Sangat Tinggi
2.	Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.	12	Sangat Tinggi
3.	Proses akuntansi sejak awal hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	11,78	Sangat Tinggi
4.	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	11,25	Sangat Tinggi
5.	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.	12	Sangat Tinggi

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Tabel 4.15 menunjukkan hasil analisis diskriptif indikator pemanfaatan teknologi informasi. Indikator jaringan internet telah terpasang di unit kerja memiliki kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 8,31. Hal ini berarti setiap

pemerintah desa telah terpasang jaringan internet yang sangat tinggi. Indikator jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 12. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan jaringan komputer dengan tinggi sebagai penghubung antar unit kerja. Indikator proses akuntansi sejak awal hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 11,78. Hal ini berarti setiap pemerintah desa sudah bernilai sangat tinggi dalam memproses akuntansi sejak awal hingga laporan keuangan dengan komputerisasi.

Indikator pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 11,25. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah desa telah menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 12. Hal ini berarti pemerintah desa sudah sangat tinggi dalam penyusunan laporan keuangan dengan sistem yang saling berintegrasi.

Tabel 4.16
Statistik Deskriptif Variabel Profesionalitas

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P	64	36	75	56.16	10.707
Valid N (listwise)	64				

Sumber: *output SPSS Statistic 23*, data diolah 2020

Hasil analisis statistik diskriptif variabel profesionalitas disajikan dalam *output SPSS Statistic 23.0* pada Tabel 4.16 dengan nilai minimum sebesar 36 dan nilai *maximum* sebesar 75. Profesionalitas memiliki nilai *mean* sebesar 56,16 dan nilai standar deviasi atau penyebaran data sebesar 10,707. Analisis statistik diskriptif variabel dijabarkan dalam tabel distribusi frekuensi variabel profesionalitas sebagai berikut:

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Variabel Profesionalitas

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	62-73	21	32,81%	Sangat Tinggi	56,16
2	50-61	31	48,44%	Tinggi	
3	39-49	12	18,75%	Cukup	
4	27-38	0	0%	Rendah	
5	15-26	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan bahwa profesionalitas pada aparatur pemerintah desa di desa se-Kecamatan Kota dalam kategori tinggi yaitu sejumlah 31 responden atau sebesar 48,44%, kemudian 21 responden atau sebesar 32,81% menunjukkan profesionalitas dalam kategori sangat tinggi dan 12 responden atau sebesar 18,75% menunjukkan profesionalitas dalam kategori cukup. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner responden sebesar 56,16 yang tgermasuk dalam kategori tinggi.

Variabel profesionalitas diukur dengan 5 indikator yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Berikut hasil pengujian indikator profesionalitas:

Tabel 4.18
Analisis Diskriptif Indikator Variabel Profesionalitas

No.	Indikator	Mean	Kriteria
1.	Pengabdian pada profesi.	11,48	Sangat Tinggi
2.	Kewajiban sosial.	11,73	Sangat Tinggi
3.	Kemandirian.	10,94	Sangat Tinggi
4.	Keyakinan terhadap peraturan profesi.	10,67	Tinggi
5.	Hubungan dengan sesama profesi.	15,41	Sangat Tinggi

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan bahwa indikator pengabdian pada profesi dalam kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 11,48. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota memiliki pengetahuan yang sangat profesional dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator kewajiban sosial menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 11,73. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota memiliki kewajiban sosial yang sangat tinggi baik untuk masyarakat maupun profesional dalam pekerjaan tersebut.

Indikator kemandirian menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 10,94. Hal ini berarti bahwa rata-rata aparatur desa di Kecamatan Kota memiliki kemandirian yang sangat tinggi dalam pengambilan keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dalam mengelola dana desa. Indikator keyakinan terhadap peraturan profesi menunjukkan kriteria tinggi dengan nilai rata-rata 10,67. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota telah memiliki keyakinan terhadap peraturan profesi yang tinggi. Indikator hubungan dengan sesama profesi menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata 15,41. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan

sesama profesi yang dimiliki oleh rata-rata aparatur desa di Kecamatan Kota sudah sangat tinggi.

4.1.3 Uji Prasyarat

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji distribusi normal yang dimiliki model regresi, variabel pengganggu atau residual. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Monte Carlo* dengan menggunakan nilai signifikansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Uji normalitas yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dengan *IBM SPSS Statistic 23.0*:

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas (Uji *One-Sample Monte Carlo Test*)
One-Sample Monte Carlo Test

		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	7.28990901	
Most Extreme Differences	Absolute	.111	
	Positive	.111	
	Negative	-.086	
Test Statistic		.111	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.047 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.381 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.369
		Upper Bound	.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: *Output SPSS Statistic 23.0*, data diolah 2020

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai *test statistic* sebesar 0,381 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data berdistribusi normal ($0,381 > 0,05$) dengan kata lain variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik karena memiliki distribusi data normal.

4.1.3.2 Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan serta untuk mengetahui hubungan linear antara variabel X dan Y. Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji *lagrange multiplier* yang dapat dilihat pada *output SPSS 23.0* dalam kolom *R Square* untuk menghitung c^2 tabel. Model dikatakan linier apabila c^2 hitung $< c^2$ tabel. Hasil uji linearitas dengan program *SPSS 23.0* sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Linearitas

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.897	.886	6.40266
a. Predictors: (Constant), ZX3_ZM, Zscore(X3), ZX1_ZM, ZX2_ZM, Zscore(X1), Zscore(X2)				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: *Output SPSS Statistic 23.0*, data diolah 2020

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai *R Square* adalah 0,897 dengan jumlah $n = 64$, sehingga c^2 hitung ($64 \times 0,897$) = 57,408. Hasil dari c^2 tabel dengan $df = 64$ dan nilai signifikansi 0,05 adalah 83,675. Berdasarkan hasil perhitungan c^2 hitung dibandingkan dengan c^2 tabel dapat disimpulkan c^2 hitung dapat disimpulkan c^2 hitung $< c^2$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa antara partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi

informasi dan profesionalitas terdapat hubungan yang linear terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena $VIF = 1/Tolerance > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$.

Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95,095	1,744		54,533	,000		
	Zscore(X1)	12,878	2,221	,680	5,797	,000	,132	7,584
	Zscore(X2)	-3,851	2,544	-,203	-1,514	,136	,101	9,945
	Zscore(X3)	8,575	2,075	,453	4,132	,000	,151	6,618
	ZX1_ZM	-,574	2,892	-,010	-,199	,843	,691	1,446
	ZX2_ZM	,024	3,037	,000	,008	,994	,488	2,050
	ZX3_ZM	-3,983	2,486	-,083	-1,602	,115	,667	1,498

Sumber: *Output SPSS Statistic 23.0*, data diolah 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.21, dapat diketahui bahwa nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ untuk ketiga variabel independen dan variabel moderasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen di dalam data penelitian. Kesimpulan

yang dapat ditarik adalah model regresi dalam penelitian ini dinyatakan baik karena tidak memiliki korelasi antar variabel independen.

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan *varance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi pada penelitian ini. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Dasar penentuan heteroskedastisitas dengan uji Glejser yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.632	1.029		4.503	.000
	Zscore(X1)	1.038	1.310	.275	.792	.432
	Zscore(X2)	-.731	1.500	-.194	-.487	.628
	Zscore(X3)	-.234	1.224	-.062	-.191	.849
	ZX1_ZM	-2.640	1.706	-.235	-1.548	.127
	ZX2_ZM	1.421	1.791	.143	.793	.431
	ZX3_ZM	1.665	1.466	.175	1.135	.261

a. Dependent Variable: AbRes

Sumber: *Output SPSS Statistic 23.0*, data diolah 2020

Uji Glejser dalam penelitian ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.22 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dapat dikatakan bahwa probabilitas signifikansinya melebihi tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

4.1.5 Hasil Analisis Model Regresi Moderasi

Analisis model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara interaksi antara variabel moderating dengan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji moderasi dalam penelitian ini menggunakan uji selisih mutlak dari variabel independen. Dasar dari penentuan variabel moderasi adalah apabila variabel selisih mutlak antara variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi memiliki angka signifikan. Berikut hasil analisis moderasi regresi menggunakan *SPSS 23.0*:

Tabel 4.23
Hasil Uji Regresi Moderasi (Uji Nilai Selisih Mutlak)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95.095	1.744		54.533	.000
	Zscore(X1)	12.878	2.221	.680	5.797	.000
	Zscore(X2)	-3.851	2.544	-.203	-1.514	.136
	Zscore(X3)	8.575	2.075	.453	4.132	.000
	ZX1_ZM	-.574	2.892	-.010	-.199	.843
	ZX2_ZM	.024	3.037	.000	.008	.994
	ZX3_ZM	-3.983	2.486	-.083	-1.602	.115

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *Output SPSS Statistic 23.0*, data diolah 2020

Bentuk persamaan regresi pada penelitian ini menggunakan nilai *standardized (Z-score)* dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 [X_1 - M] + \beta_5 [X_2 - M] + \beta_5 [X_2 - M] + \epsilon$$

$$Y = 95,095 + 12,878 X_1 - 3,851 X_2 + 8,575 X_3 - 0,574 [X_1 - M] + 0,024 [X_2 - M] - 3,983 [X_2 - M] + 1,744$$

Berikut merupakan penjelasan hasil uji nilai selisih mutlak dari persamaan diatas:

1. Koefisien regresi menunjukkan tanda positif (+) yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang searah yaitu peningkatan variabel X akan menyebabkan peningkatan variabel Y. Koefisien regresi menunjukkan tanda negatif (-) yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang berbanding terbalik yaitu peningkatan variabel X akan menyebabkan penurunan variabel Y.

2. Konstanta = 95,095

Hal ini berarti apabila variabel partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, profesionalitas, variabel partisipasi masyarakat yang dimoderasi variabel profesionalitas, variabel sistem pengendalian intern yang dimoderasi variabel profesionalitas, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi variabel profesionalitas bernilai nol, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai 95,095.

3. Koefisien $X_1 = 12,878$

Koefisien regresi untuk pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 12,878, hal ini berarti menunjukkan akan terjadi peningkatan sebesar 12,878 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika tingkat partisipasi masyarakat naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain adalah konstan.

4. Koefisien $X_2 = -3,851$

Koefisien regresi untuk pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar -3,851, hal ini menunjukkan akan terjadi penurunan sebesar -3,851 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika tingkat sistem pengendalian intern naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain adalah konstan.

5. Koefisien $X_3 = 8,575$

Koefisien regresi untuk pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 8,575, hal ini menunjukkan akan terjadi peningkatan sebesar 8,575 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika tingkat pemanfaatan teknologi informasi naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain adalah konstan.

6. Koefisien $X_{1M} = -0,574$

Koefisien regresi untuk variabel partisipasi masyarakat yang dimoderasi variabel profesionalitas sebesar -0,574, hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan sebesar -0,574 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika profesionalitas memoderasi hubungan antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain konstan.

7. Koefisien $X_{2M} = 0,024$

Koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian intern yang dimoderasi variabel profesionalitas sebesar 0,024, hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan sebesar 0,024 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika profesionalitas memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain konstan.

8. Koefisien $X_3M = -3,983$

Koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi variabel profesionalitas sebesar -3,983, hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan sebesar -3,983 pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jika profesionalitas memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain konstan.

4.1.6 Uji Hipotesis Penelitian

4.1.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar keputusan pada uji t dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) pada hasil *output SPSS 23.0* di tabel *Coeffiency*. Jika perhitungan menghasilkan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial. Hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) telah disajikan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95.095	1.744		54.533	.000
	Zscore(X1)	12.878	2.221	.680	5.797	.000
	Zscore(X2)	-3.851	2.544	-.203	-1.514	.136
	Zscore(X3)	8.575	2.075	.453	4.132	.000
	ZX1_ZM	-.574	2.892	-.010	-.199	.843
	ZX2_ZM	.024	3.037	.000	.008	.994
	ZX3_ZM	-3.983	2.486	-.083	-1.602	.115

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik t pada tabel diatas, pada setiap variabel diperoleh nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Variabel partisipasi masyarakat (X1) diperoleh nilai sig. 0,000 dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,680 karena nilai sig. < 0,05 dan nilai *standardized coefficients beta* bertanda positif maka H₁ **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.
2. Variabel sistem pengendalian intern (X2) diperoleh nilai sig. 0,136 dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,203 karena nilai sig. > 0,05 dan nilai *standardized coefficients beta* bertanda negatif maka H₁ **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.

3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) diperoleh nilai sig. 0,000 dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,453 karena nilai sig. < 0,05 dan nilai *standardized coefficients beta* bertanda positif maka H₁ **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.
4. Peran variabel profesionalitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (X₁M) diperoleh nilai sig. 0,843 dan nilai *standarized coefficients beta* sebesar -0,010 karena nilai sig. > 0,05 dan nilai *standarized coefficients beta* maka H₄ **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas tidak memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.
5. Peran variabel profesionalitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (X₂M) diperoleh nilai sig. 0,994 dan nilai *standarized coefficients beta* sebesar 0,000 karena nilai sig. > 0,05 dan nilai *standarized coefficients beta* maka H₄ **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas tidak memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.
6. Peran variabel profesionalitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (X₃M) diperoleh nilai sig. 0,115 dan nilai *standarized coefficients beta* sebesar -0,083 karena nilai sig. > 0,05 dan nilai *standarized coefficients beta*

maka H_4 **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas tidak memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kota.

4.1.6.2 Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2)

Koefisien determinasi secara parsial (r^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing prediktor secara parsial, yaitu variabel partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui variabel profesionalitas sebagai variabel moderasi dengan taraf signifikansi 5%. Koefisien determinasi secara parsial dicari menggunakan program *SPSS versi 23.0* pada kolom *correlations-partial*.

Tabel 4.25
Koefisien Determinasi secara Parsial (r^2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	95,095	1,744		54,533	,000			
	Zscore(X1)	12,878	2,221	,680	5,797	,000	,923	,609	,247
	Zscore(X2)	-3,851	2,544	-,203	-1,514	,136	,842	-,197	-,064
	Zscore(X3)	8,575	2,075	,453	4,132	,000	,896	,480	,176
	ZX1_ZM	-,574	2,892	-,010	-,199	,843	-,204	-,026	-,008
	ZX2_ZM	,024	3,037	,000	,008	,994	-,142	,001	,000
	ZX3_ZM	-3,983	2,486	-,083	-1,602	,115	-,394	-,208	-,068

Sumber: data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.25 kontribusi secara parsial masing-masing variabel, maka diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Kontribusi variabel partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah $(0,609)^2 \times 100\% = 37,09\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel partisipasi masyarakat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 37,09%.
2. Kontribusi variabel sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah $(-0,197)^2 \times 100\% = 3,88\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern mempengaruhi dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 3,88%.
3. Kontribusi variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah $(0,480)^2 \times 100\% = 23,04\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 23,04%.
4. Kontribusi variabel partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi adalah $(-0,026)^2 \times 100\% = 0,07\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel partisipasi masyarakat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi sebesar 0,07%.
5. Kontribusi variabel sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi adalah $(0,001)^2 \times 100\% = 0,0001\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern mempengaruhi dan berkontribusi

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi sebesar 0,0001%.

6. Kontribusi variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi adalah $(-0,208)^2 \times 100\% = 4,33\%$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalitas sebagai variabel moderasi sebesar 4,33%.

Tabel 4.26
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Keterangan	Koefisien Regresi	Sig.	Hasil
1.	H ₁	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	12,878	0,000	Diterima
2.	H ₂	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	-3,851	0,136	Ditolak
3.	H ₃	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	8,575	0,000	Diterima
4.	H ₄	Profesionalitas memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	-0,574	0,843	Ditolak

5.	H ₅	Profesionalitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,024	0,994	Ditolak
6.	H ₆	Profesionalitas memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	-3,983	0,115	Ditolak

Sumber: data penelitian yang diolah, 2020

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa

Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 12,878 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H₁ yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**. Besarnya pengaruh secara parsial dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 37,09%. Pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki nilai rata-rata sebesar 34,83. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa di Kecamatan

Kota telah berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai tahap evaluasi dalam mengelola dana desa. Hal ini berarti bahwa rata-rata masyarakat desa di Kecamatan Kota telah memiliki jiwa berpartisipasi yang tinggi.

Variabel partisipasi masyarakat memiliki tiga indikator. Indikator pengambilan keputusan memiliki nilai rata-rata 12, indikator penyusunan anggaran memiliki nilai rata-rata 11,11, dan indikator pelaksanaan anggaran memiliki nilai rata-rata 15,47. Hal ini berarti indikator variabel partisipasi masyarakat memberi dukungan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil deskripsi responden menyatakan bahwa masa kerja 5-10 tahun memiliki presentase terbesar yaitu sebesar 37,5%, masa kerja >15 tahun sebesar 31,25%, masa kerja 11-15 tahun sebesar 23,44%, sedangkan masa kerja 1-5 tahun hanya memiliki presentase sebesar 7,81%. Hasil deskripsi responden ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa yang bekerja selama 5 tahun atau lebih memiliki pengaruh yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Justifikasi atas pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesannya. Kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara

memaksimalkan utilitas manajemen dan *principal*. Kesuksesan organisasi pula melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat suatu keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota menjadi baik.

Keterlibatan masyarakat yang berupa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kontrol mampu mendorong aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dengan cara yang baik dan bertanggungjawab. Partisipasi masyarakat ini merupakan keterlibatan dan kontribusi secara fisik dan mental dalam berbagai kegiatan bersama, sebagai realisasi akan hak dan kewajiban setiap warga khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang baik. Masyarakat juga melakukan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, maka setelah mendapatkan tekanan dan tuntutan dari pihak masyarakat mengenai pengelolaan dana desa sebagai aparatur desa timbul rasa untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dengan cara yang baik, sesuai dengan kenyataan, dan bertanggungjawab. Dengan demikian masyarakat yang terlibat berpartisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa haruslah mengetahui secara keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan pada pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017) dengan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh sebesar 23%

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) juga menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh sebesar 54,5% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Umaira dan Adnan (2019) juga menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh sebesar 23,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Besarnya pengaruh secara parsial dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 3,88%. Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian intern sebesar -3,851 dengan nilai signifikansi 0,136, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki nilai rata-rata sebesar 103,02. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota memiliki keinginan untuk tetap melakukan pengendalian intern terkait pengelolaan dana desa agar bisa mengendalikan jalannya operasional pemerintahan desa dan dapat mencapai tujuan pemerintahan

yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah desa memiliki sistem pengendalian yang tinggi.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian dengan nilai rata-rata 32,25, penilaian risiko memiliki nilai rata-rata 12,25, kegiatan pengendalian memiliki nilai rata-rata 27,23, informasi dan komunikasi memiliki nilai rata-rata 19,56, dan pemantauan pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 15,41. Meskipun nilai rata-rata variabel sistem pengendalian intern baik namun akuntabilitas pengelolaan dana desa tergolong tinggi. Hal ini berarti sistem pengendalian intern tidak menjadi pengaruh dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Yudianto dan Sugiarti (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern menjadi salah satu keberhasilan pengelolaan keuangan, akan tetapi hal tersebut kurang berpengaruh pada elemen terkecil dari pemerintahan. Pengelolaan dana desa secara akuntabel memerlukan kepercayaan dan bertanggungjawab yang tinggi. Hal tersebut harus dimiliki oleh seluruh aparat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan tim pengendalian internal dari perangkat desa masih minim pengetahuan tentang pengelolaan laporan keuangan sehingga saat mengendalikan hanya mempercayai jumlah dana yang masuk dan dana yang keluar. Lingkungan pengendalian sebaiknya mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin,

kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik.

Selain itu, sebuah organisasi yang tidak menerapkan standar pengendalian internal, standar operasional dan segala prosedur yang baik ketika melakukan suatu pekerjaan pengelolaan dana desa akan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang tidak dapat tersusun dengan baik secara otomatis pengelolaan dana desa akan mengalami banyak kendala karena telah belum memiliki *schedule* dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga akan terjadi keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah dan Pramuka (2017) bahwa sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 8,575 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**. Besarnya pengaruh secara parsial dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 23,04%. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 55,34. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota telah memanfaatkan teknologi informasi dengan kapasitas yang tinggi. Hal ini didukung dengan bagian pengelola dana desa memiliki komputer yang cukup, telah terdapat jaringan internet yang terpasang dan dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja, proses akuntansi yang dilakukan secara komputerisasi, penggunaan software yang sesuai dengan undang-undang, laporan akuntansi dan manajerial dari sistem yang terintegrasi, serta adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan peralatan yang rusak diganti tepat waktu.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki lima indikator. Indikator jaringan internet telah terpasang di unit kerja memiliki nilai rata-rata 8,31, indikator jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan memiliki nilai rata-rata 12, indikator proses akuntansi sejak awal hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi memiliki nilai rata-rata 11,78, indikator pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki nilai rata-rata 11,25, sedangkan indikator laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi memiliki nilai rata-rata 12. Hal ini berarti indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi memberi dukungan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aparatur pemerintah desa memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Tujuan dari aparatur pengelola dana desa adalah dapat mengelola dana desa dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut aparatur pengelola dana desa harus memiliki kompetensi dan tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi. Hasil penelitian ini senada dengan Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi pada kepentingan-kepentingan individu akan tetapi lebih terfokus pada kepentingan dan tujuan perusahaan. Komarasari (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi adalah peranan dari pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan bentuk keahlian aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa pengelola dana desa telah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dalam mengelola dana desa. Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang menunjang dari kantor desa untuk pengelola dana desa seperti komputer dan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi ini memberikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota menjadi semakin baik.

Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian Perdana (2018) dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 40,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 8,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Hal ini sama dengan hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 23,04%

4.2.4 Peran Profesionalitas Dalam Memperkuat Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien pada persamaan tersebut yaitu sebesar -0,574 dengan nilai signifikansi sebesar 0,843. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan profesionalitas berpengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profesionalitas tidak terbukti signifikan menjadi variabel moderasi dalam hubungan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Besarnya peran profesionalitas dalam memoderasi hubungan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 0,07%.

Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa profesionalitas memiliki rata-rata sebesar 56,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa pengelola dana desa di Kecamatan Kota telah memiliki rata-rata masa kerja diatas 5 tahun yaitu masa kerja 5-10 tahun sebesar 37,5%, masa kerja 11-15 tahun sebesar 23,44%, dan masa kerja > 15 tahun sebesar 31,25% , akan tetapi terdapat beberapa aparatur pemerintah desa yang memiliki masa kerja 1-5 tahun sebesar 7,81%. Profesionalitas aparatur pemerintah desa yang memiliki hasil tinggi, tetap

menghasilkan partisipasi masyarakat berkategori tinggi. Hal ini berarti meskipun profesionalitas aparatur pemerintah desa pengelola dana desa rata-rata memiliki masa kerja tertinggi antara 5-10 tahun, aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota tetap memiliki masyarakat dengan jiwa berpartisipasi yang tinggi terhadap pemerintah desa.

Data empiris menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif profesionalitas dalam kategori tinggi, dan partisipasi masyarakat juga dalam kategori tinggi. Profesionalitas aparatur pemerintah desa yang mengelola dana desa tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota. Pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kecamatan Kota tidak didasari dari masa kerja aparatur pengelola dana desa, melainkan dari partisipasi masyarakat pengelola dana desa untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Hal ini berarti aparatur pengelola dana desa yang telah memiliki masa kerja 5-10 tahun tidak menjamin akan memberikan dampak partisipasi pada masyarakat untuk mengelola dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan baik sebab aparatur pengelola dana desa memiliki rasa tanggungjawab yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan tugasnya.

Aparatur pemerintah desa telah memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Aparatur yang bertugas mengelola dana desa akan tetap menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan keahliannya. Profesionalitas aparatur pengelola dana desa kurang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebab aparatur desa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi

4.2.5 Peran Profesionalitas Dalam Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien pada persamaan tersebut yaitu sebesar 0,024 dengan nilai signifikansi sebesar 0,994. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 yang menyatakan profesionalitas berpengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profesionalitas tidak terbukti signifikan menjadi variabel moderasi dalam hubungan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Besarnya peran profesionalitas dalam memoderasi hubungan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 0,0001%.

Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa profesionalitas memiliki rata-rata sebesar 56,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa pengelola dana desa di Kecamatan Kota telah memiliki rata-rata masa kerja diatas 5 tahun yaitu masa kerja 5-10 tahun sebesar 37,5%, masa kerja 11-15 tahun sebesar 23,44%, dan masa kerja > 15 tahun sebesar 31,25% , akan tetapi terdapat beberapa aparatur pemerintah desa yang memiliki masa kerja 1-5 tahun sebesar 7,81%. Profesionalitas aparatur pemerintah desa yang memiliki hasil tinggi, tetap menghasilkan sistem pengendalian intern berkategori baik. Hal ini berarti meskipun profesionalitas aparatur pemerintah desa pengelola dana desa rata-rata

memiliki masa kerja tertinggi antara 5-10 tahun, aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota tetap memiliki upaya dalam pengendalian intern yang baik terhadap pemerintah desa.

Profesionalitas begitu penting karena profesionalitas menjadi kebutuhan bagi banyak perusahaan dan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Seseorang yang berprofesional tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan sebaliknya jika kemampuan profesional rendah maka sedikit pintu yang terbuka untuk berkarir lebih baik. Mandang, Lumanaw, dan Walangitan (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Kemampuan seseorang dalam hal ini adalah salah satunya yaitu sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern dalam hal ini adanya pembatasan aparatur yang bertugas mengendalikan pengelolaan dana desa. Aparatur desa tidak seharusnya melanggar pembatasan tersebut dengan alasan kurangnya kemampuan dalam mengendalikan pengelolaan dana desa secara akuntabel. Hal tersebut dapat berdampak pada pengendalian pengelolaan dana desa.

4.2.6 Peran Profesionalitas Dalam Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil persamaan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa koefisien pada persamaan tersebut yaitu sebesar -3,983 dengan nilai signifikansi sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa

H₆ yang menyatakan profesionalitas berpengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profesionalitas tidak terbukti signifikan menjadi variabel moderasi dalam hubungan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Besarnya peran profesionalitas dalam memoderasi hubungan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar 4,33%.

Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa profesionalitas memiliki rata-rata sebesar 56,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa pengelola dana desa di Kecamatan Kota telah memiliki rata-rata masa kerja diatas 5 tahun yaitu masa kerja 5-10 tahun sebesar 37,5%, masa kerja 11-15 tahun sebesar 23,44%, dan masa kerja > 15 tahun sebesar 31,25% , akan tetapi terdapat beberapa aparatur pemerintah desa yang memiliki masa kerja 1-5 tahun sebesar 7,81%. Profesionalitas aparatur pemerintah desa yang memiliki hasil tinggi, tetap menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi berkategori tinggi. Hal ini berarti meskipun profesionalitas aparatur pemerintah desa pengelola dana desa rata-rata memiliki masa kerja tertinggi antara 5-10 tahun, aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kota tetap memiliki upaya pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi terhadap pemerintah desa.

Profesionalitas begitu penting karena profesionalitas menjadi kebutuhan bagi dasar banyak perusahaan dan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Seseorang yang berprofesional tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan sebaliknya jika kemampuan profesional rendah maka sedikit pintu yang terbuka untuk berkarir lebih baik. Mandang, Lumanaw, dan Walangitan (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Berdasarkan hasil deskripsi responden menyatakan bahwa masa kerja 5-10 tahun memiliki presentase terbesar yaitu sebesar 37,5%, masa kerja >15 tahun sebesar 31,25%, masa kerja 11-15 tahun sebesar 23,44%, sedangkan masa kerja 1-5 tahun hanya memiliki presentase sebesar 7,81%.

Kemampuan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan yang mendukung tetapi juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan masa kerja. Seseorang yang berprofesional tinggi belum tentu mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik apabila memang tidak sesuai dengan bidang dan kebutuhannya. Begitu pula dengan seseorang yang tidak berprofesional tinggi belum tentu tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik hal ini dapat dipelajari sendiri, dan sesuai dengan kebutuhannya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencatatannya menggunakan sistem yang sudah diatur dalam undang-undang. Sistem ini tidak mudah untuk dipelajari, meskipun telah diadakan pelatihan dan diklat. Seseorang yang berprofesional tinggi belum tentu dapat mengoperasikan sistem tersebut, karena diperlukan banyak latihan dan

pemahaman. Sehingga profesionalitas tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Perdana, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
4. Profesionalitas tidak mampu memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
5. Profesionalitas tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
6. Profesionalitas tidak mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Aparatur pengelola dana desa hendaknya dapat menyertakan banner transparansi APBDesa yang disusun oleh aparatur desa yang bertujuan sebagai salah satu bentuk transparansi publik khususnya masyarakat desa.
2. Aparatur pengelola dana desa hendaknya dapat mengelola BUMDES minimal satu (1) sehingga tujuannya BUMDES berkontribusi dengan masyarakat desa dan dapat membantu pihak masyarakat dari segi modal untuk mengembangkan usahanya.
3. Partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tersebut harus dipertahankan, oleh karena itu aparatur pengelola dana desa disarankan sering mengadakan acara pertemuan warga agar tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat yang baik.
4. Pemanfaatan teknologi informasi pemerintah desa di Kecamatan Kota termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tersebut harus dipertahankan dengan cara aparatur pengelola dana desa mengadakan pelatihan siskeudes untuk setiap pengelola dana desa dan perangkat lain, untuk mengantisipasi pergantian operator sewaktu-waktu.
5. Bagi pemerintah desa dalam perekrutan aparatur pemerintah desa khususnya aparatur pengelola dana desa diberikan persyaratan khusus, seperti pendidikan terakhir linier dengan formasi yang akan diisi oleh pendaftar, dan memiliki keahlian khusus yang nantinya diperlukan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti mampu mengoperasikan aplikasi *microsoft*.
6. Bagi peneliti selanjutnya, karena hasil pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi masih

sangat kecil, bisa diteliti faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti dengan mengerutkan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penggunaan *software* sesuai dengan undang-undang atau siskeudes, yang diduga penggunaan siskeudes memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Ribot, J. (2012). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.
- Amin Widjaja Tunggal. 2013. *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Anto, Rola Pola dan Muhammad Amir. 2017. *Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency- Indonesia*. *IOSR Journal of Business and Management*. Vol. 19 No. 11: hal 66-71.
- Armstrong, M. dan Baron, A. 1998. *Performance Management – The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- Azlina, Nur,dkk. 2017. *The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau*. *International Journal of Economic Research*.Vol. 14 No. 12: hal 325-336.
- Bappenas. (2017). *SIMPUL Perencana Nawa Cita* (Vol. 29, Issue April).
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>.
- Donaldson, Lex dan James H, Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. Vol. 16. No. 1
- Fernanda, Hendrick. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gordon. (1988). *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Haag, S dan Keen P. 1996. *Information Technology, Tomorrow's Advantage Today*. McGraw-Hill.
- Hansen, Don R dan Maryanne M.Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R dan Maryanne M.Mowen. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idward, N. N. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia, Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)*. 102(4), 24–25. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrajaya, Johan Arief. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Ivancevich, Konopaske, dan Matteson. 2008. *Organizational Behavior and Management*. New York: McGraw-Hill International.
- Jayanti, A.A. Sg. Siskarini, I Wayan Gede Supartha dan Made Subudi. 2016. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 5.No. 11
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 5(2):214-226.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2005. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal SOROT*. Vol. 9 No. 1: hal 1-121
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Buku Saku Dana Desa*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Buku Saku Dana Desa*.
- Komarasari, W. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 65–66. <https://doi.org/10.1021/om050941q>.

Kompas.com (19 Desember 2019) Dana Desa dan Transfer Daerah Mengendap Rp 234 Triliun. Tersedia di: <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/182418726/dana-desa-dan-transfer-daerah-mengendap-rp-234-triliun-kok-bisa>. Diakses tanggal 19 Desember 2020.

Kumalasari, L. (2018). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa diKecamatan Bayat)*. Skripsi. Klaten: Universitas Widya Dharma.

Kurrohman, Taufik. 2015. *Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi*. International Conference On Accounting Studies (hal. 319-324). Johor Bahru.

Mada, S., Kalangi, L., & Hendrik, G. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, Vol 8, No, 106–115.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Marlinawati dan Dewi Kusuma. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 26 No. 2: hal 131-143.

Martin, E. 1999. *Managing Information Technology What Managers Need to Know*. New Jersey: Pearson Education International.

Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sumbawa. *Journal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1), 106–123.

Medianti, Larasantika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB*. Vol. 1 No. 1: hal. 1-13.

- Munib, Achmad. 2015 *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: UPT UNNES PRESS
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. agus. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Morrow, and J.F. Goetz (1998). Professionalism as form of work commitment. *Journal of Vocational Behavior* 32 : pp. 92-111.
- Najahningrum, A. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. 224.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Perdana, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen*, 10(1), 68–81.
- Robbins SP, & Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2006. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruky, H. Achamd S.2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akunatnsi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

- Suwardjono. 2007. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Tempo.Co* (30 Juni 2018) Di Jawa Tengah, Dana Desa Tidak Terserap Optimal. Tersedia di: <https://bisnis.tempco.co/read/1111894/di-jawa-tengah-dana-desa-tidak-terserap-optimal/full&view=ok>. Diakses tanggal 4 November 2019.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2016. Audit Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Tudikromo, A. M. (2015). *Pengaruh Profesionalisme Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dimoderating Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (Studi pada Pemerintah Kota Bandung) Pemerintah*.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>.
- Umar, Haryono, Sidin Usman dan Rahima Br. Purba. 2018. *The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports*. International Journal of Ci.
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Wibowo. 2017. *Perilaku Dalam Organisasi*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Widyatama, Arif, Lola Novita dan Diarepati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2. No. 2: hal. 1-20.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>.

Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR RESPONDEN UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

NO. RES	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	NAMA DESA
1.	Zaenal	Laki-laki	Kepala Desa	Mlati Lor
2.	Umar Yunani	Laki-laki	Sekretaris Desa	Mlati Lor
3.	Susi Kristanti	Perempuan	Bendahara Desa	Mlati Lor
4.	Budiyanti	Perempuan	Kepala Seksi	Mlati Lor
5.	-	Perempuan	Kepala Desa	Nganguk
6.	-	Laki-laki	Sekretaris Desa	Nganguk
7.	-	Perempuan	Bendahara Desa	Nganguk
8.	-	Laki-laki	Kepala Seksi	Nganguk
9.	-	Laki-laki	Kepala Desa	Rendeng
10.	Soeprodjo Al Djito	Laki-laki	Sekretaris Desa	Rendeng
11.	Fajar Nugroho	Laki-laki	Bendahara Desa	Rendeng
12.	Gunawan Rukmanto	Laki-laki	Kepala Seksi	Rendeng
13.	Slamet Wibowo	Laki-laki	Kepala Desa	Burikan
14.	Jasmani	Laki-laki	Sekretaris Desa	Burikan
15.	S. Latif	Laki-laki	Bendahara Desa	Burikan
16.	David Yuliastono	Laki-laki	Kepala Seksi	Burikan
17.	Moch. Ronif Noor	Laki-laki	Kepala Desa	Barongan
18.	Sonatira	Perempuan	Sekretaris Desa	Barongan
19.	NN	Perempuan	Bendahara Desa	Barongan
20.	Bangun Mulyo Wibowo	Laki-laki	Kepala Seksi	Barongan
21.	Suyadi	Laki-laki	Kepala Desa	Kaliputu
22.	Fatkah Sudarmaji	Laki-laki	Sekretaris Desa	Kaliputu
23.	Masni	Perempuan	Bendahara Desa	Kaliputu
24.	Kamad Supriyadi	Laki-laki	Kepala Seksi	Kaliputu
25.	Budi Himawan	Laki-laki	Kepala Desa	Kramat
26.	Achmat Sururi	Laki-laki	Sekretaris Desa	Kramat
27.	Dani septi Haryani	Perempuan	Bendahara Desa	Kramat
28.	Susanti	Perempuan	Kepala Seksi	Kramat
29.	Muslihin	Laki-laki	Kepala Desa	Demaan
30.	Soebagiyono Wibowo	Laki-laki	Sekretaris Desa	Demaan
31.	Juni Sulistyowati	Perempuan	Bendahara Desa	Demaan
32.	Selamet Thohir	Laki-laki	Kepala Seksi	Demaan

Lampiran 2

KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi.

No.	Variabel	Indikator	No. Soal	Jumlah Soal
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Penatausahaan 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014)	1,2,3,4	25
			5,6,7,8,9	
			10,11,12,13,14,15,16	
			17,18,19 20,21,22,23,24,25	
2.	Partisipasi Masyarakat	1) Pengambilan keputusan 2) Penyusunan anggaran 3) Pelaksanaan anggaran (Heller <i>et al</i> (1984) dan Sujarweni (2018))	26,27,28	9
			29,30,31	
			32,33,34	
3.	Sistem Pengendalian Intern	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian internal (PP Nomor 60 Tahun 2008)	35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44	28
			45,46,47	
			48,49,50,51,52,53, 54	
			55,56,57,58,59	
			60,61,62	
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja 2) Jaringan komputer telah dimanfaatkan	63,64,65	16

No.	Variabel	Indikator	No. Soal	Jumlah Soal
		sebagai penghubung antar unit kerja, dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 3) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi 4) Pengelolaan dana transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi (Jurnali dan Supomo (2002))	66,67,68 69,70,71,72 73,74,75 76,77,78	
5.	Profesionalitas	1) Pengabdian Pada Profesi. 2) Kewajiban Sosial. 3) Kemandirian. 4) Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi. 5) Hubungan dengan Sesama Profesi. (Morrow dan Goets (1998) dan Abdullah Adri 2017)	79,80,81 82,83,84 85,86,87 88,89,90 91,92,93	15

Lampiran 3

UJI COBA



**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
PROFESIONALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)**

UJI COBA PENELITIAN

Oleh

Siti Ulya Ani

NIM 7101416310

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/I Pemerintah Desa
di tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ulya Ani
NIM : 7101416310
Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut. Kuesioner berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi adalah “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pemerintah desa. Oleh karena itu saat menjawab pertanyaan kuesioner ini diharapkan Bapak/Ibu/Sdr/i bersikap terbuka dan jujur. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi kuesioner ini saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Siti Ulya Ani
NIM. 7101416310

KUESIONER PENELITIAN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi identitas secara lengkap. Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data. Untuk jawaban pilihan dilakukan dengan memberi tanda *checklist* (✓)

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD D3
 SMP S1
 SMA/SMK S2
Lainnya
5. Jurusan :
6. Nama Desa :
7. Jabatan : Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Bendahara Desa
 Kepala seksi
8. Masa Kerja : Tahun
9. Pelatihan yang pernah diikuti :
10. Ikatan Profesi yang diikuti :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon dengan hormat, bantuan, kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini.
2. Berikan tanda *checklist* (✓) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

SS	Sangat Setuju
S	Setuju
RR	Ragu-Ragu
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Perencanaan						
1.	Aparatur desa ikut menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.					
2.	Aparatur desa merasa Raperdes APBDesa telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.					
3.	Aparatur desa menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa					
4.	Aparatur desa merasa Raperdes APBDesa telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.					
Pelaksanaan						
5.	Pengeluaran dana desa di desa saya dilaksanakan melalui rekening kas desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
6.	Pemasukan dana desa di desa saya dilaksanakan melalui rekening kas desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
7.	Pemerintahan desa tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.					
8.	Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa dengan besar yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.					
9.	Pembuatan RAB untuk penggunaan biaya tak terduga serta disetujui oleh kepala desa.					
Penatausahaan						

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
10.	Aparatur desa merasa penatausahaan di desa tempat saya bekerja telah dilakukan oleh aparatur desa yang bersangkutan.					
11.	Pencatatan setiap pengeluaran dana desa yang terjadi telah dilakukan oleh aparatur di desa tempat saya bekerja.					
12.	Pencatatan setiap penerimaan dana desa telah dilakukan oleh aparatur di desa tempat saya bekerja.					
13.	Bendahara desa telah melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan					
14.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Kas Umum guna mempermudah dalam pengelolaan dana di desa tempat saya bekerja.					
15.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Kas Pembantu guna memperlancar dalam pengelolaan dana di desa tempat saya bekerja.					
16.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Bank guna mempermudah dalam pengelolaan dana desa di tempat saya bekerja.					
Pelaporan						
17.	Aparatur desa merasa kepala desa di tempat saya bekerja telah menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.					
18.	Aparatur merasa kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.					
19.	Di desa tempat saya saya bekerja kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun.					
Pertanggungjawaban						
20.	Saya sebagai aparatur desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
	akhir tahun anggaran.					
21.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang berupa pendapatan belanja dibuat oleh aparatur desa di desa tempat saya bekerja.					
22.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang berupa pembiayaan dibuat oleh aparatur desa di desa tempat saya bekerja.					
23.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.					
24.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa evaluasi terpisah.					
25.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.					

Partisipasi Masyarakat

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Pengambilan Keputusan						
26.	Masyarakat di desa saya terlibat dalam pengambilan keputusan program terkait pengelolaan dana desa.					
27.	Aparatur desa memberi kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan saran terkait dengan pengelolaan dana desa yang bersifat membangun.					
28.	Aparatur desa menerima kritikan terkait dengan pengelolaan dana desa dari masyarakat yang bersifat membangun.					
Penyusunan Anggaran						

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
29.	Masyarakat desa terlibat aktif dalam membuat rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan ketika penyusunan anggaran Dana Desa oleh Kepala desa dan/atau BPD.					
30.	Rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa diusulkan oleh masyarakat desa yang diajukan kepada kepala desa dan/atau BPD ketika penyusunan anggaran Dana Desa.					
31.	Masyarakat desa terlibat aktif dalam Rapat dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa.					
Pelaksanaan Anggaran						
32.	Saya merasa masyarakat desa selalu dilibatkan dalam pelaksanaan tentang perencanaan pengelolaan dana desa.					
33.	Saya bersedia menerima serta memanfaatkan hasil pembangunan sebagai wujud pengelolaan dana desa.					
34.	Saya merasa masyarakat desa terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa.					

Sistem Pengendalian Intern

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
35.	Saya merasa adanya penegakan integritas di desa tempat saya bekerja.					
36.	Saya merasa masih terdapat nilai etika di desa tempat saya bekerja.					
37.	Kegiatan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan di desa saya rata-rata diadakan setiap 3 bulan sekali sehingga dengan pelatihan yang cukup intens dapat meningkatkan kompetensi					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
	aparatur desanya.					
38.	Saya sebagai aparatur desa merasa mempunyai kepemimpinan baik agar terciptanya suasana yang kondusif					
39.	Struktur organisasi di desa saya telah menggambarkan dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian.					
40.	Saya merasa wewenang yang diberikan kepada aparatur desa di desa saya sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya secara cukup.					
41.	Adanya penyusunan kebijakan yang sehat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tempat saya bekerja.					
42.	Adanya penerapan kebijakan yang sehat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tempat saya bekerja.					
43.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut berperan dalam pengawasan intern di desa tempat saya bekerja.					
44.	Saya menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan.					
Penilaian Risiko						
45.	Saya telah memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap dana desa.					
46.	Di desa tempat saya bekerja selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh Inspektorat.					
47.	Saya merasa di desa tempat saya bekerja dalam penilaian risiko, komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.					
Kegiatan Pengendalian						
48.	Saya merasa terdapat kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah di desa saya.					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
49.	Kegiatan pengendalian di desa saya harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.					
50.	Kegiatan pengendalian yang dipilih di desa saya disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.					
51.	Saya merasa kebijakan pengendalian di desa saya harus ditetapkan secara tertulis.					
52.	Saya merasa prosedur pengendalian di desa saya harus ditetapkan secara tertulis.					
53.	Prosedur pengendalian yang telah ditetapkan di desa saya harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.					
54.	Saya merasa kegiatan pengendalian di desa saya dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.					
Informasi dan Komunikasi						
55.	Pemerintah desa di desa tempat saya bekerja telah menyediakan alat pendukung untuk sarana komunikasi yang memadai.					
56.	Saya merasa dapat memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dengan baik.					
57.	Saya merasa dapat mengelola sistem informasi secara terus menerus.					
58.	Saya merasa dapat mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.					
59.	Saya merasa selalu memperbaharui sistem informasi secara berkala.					
Pemantauan Pengendalian Internal						
60.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut andil dalam pemantauan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan di desa saya.					
61.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut serta dalam melakukan evaluasi terpisah terhadap sistem pengendalian internal secara berkala di desa saya.					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
62.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta review lainnya terhadap sistem pengendalian intern					

Pemanfaatan Teknologi Informasi

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Jaringan Internet						
63.	Di kantor pemerintah desa saya terdapat jaringan internet yang mendukung sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur.					
64.	Jaringan internet di kantor desa saya berfungsi dengan baik, sehingga dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai tujuan.					
65.	Adanya jaringan internet yang terpasang saya sebagai aparatur desa menjadi mudah dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dalam pengelolaan dana desa.					
Pemanfaatan Jaringan Komputer						
66.	Saya memanfaatkan jaringan komputer dalam mempermudah pengelolaan dana desa dan tidak menghambat prosedur yang berlaku.					
67.	Saya memanfaatkan jaringan komputer sebagai penghubung unit kerja saya dengan yang lainnya.					
68.	Saya memanfaatkan jaringan komputer untuk memperoleh informasi yang saya butuhkan.					
Pencatatan Secara Komputerisasi						
69.	Sejak awal transaksi yang terjadi saya mencatat dengan menggunakan komputer.					
70.	Saya mencatat dana yang masuk dengan komputer.					
71.	Saya mencatat dana yang keluar dengan komputer agar pekerjaan lebih tertata.					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
72.	Saya membuat laporan keuangan dengan komputer agar alokasi dana desa lebih bagus.					
Pengelolaan dengan Software Sesuai UU						
73.	Saya mengetahui software yang harus digunakan ketika mencatat transaksi keuangan yang diatur Undang-Undang.					
74.	Saya menguasai Siskeudes baik versi lama maupun versi baru.					
75.	Saya mengelola dana desa dengan memanfaatkan Siskeudes.					
Laporan Akuntansi dan Manajerial Dihasilkan Terintegrasi						
76.	Di desa saya bagian pengelola dana desa saling terkait dengan bagian yang lain.					
77.	Laporan keuangan dana desa di desa saya berasal dari berbagai laporan setiap bagian yang membelanjakan dana desa.					
78.	Sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa saya berintegrasi dengan aplikasi siskeudes.					

Profesionalitas

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Pengabdian Pada Profesi						
79.	Saya sebagai aparatur desa dalam bekerja saya harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan dana desa.					
80.	Saya merasakan suatu kepuasan batin telah menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai aparatur desa yang telah diberikan kepada saya.					
81.	Saya sebagai aparatur desa harus memiliki pengetahuan yang kompeten terkait pengelolaan dana desa.					
Kewajiban Sosial						
82.	Saya mempunyai peran penting di lingkungan tempat saya bekerja sebagai aparatur desa.					

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
83.	Saya merasa pekerjaan saya sangat bermanfaat terhadap lingkungan tempat saya bekerja.					
84.	Saya akan tetap teguh pada profesi sebagai aparatur desa meskipun saya mendapat tawaran pekerjaan di bidang lainnya.					
Kemandirian						
85.	Saya merasa mampu membuat keputusan sendiri terkait pengelolaan dana desa tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.					
86.	Saya merasa mampu menyelesaikan suatu pekerjaan terkait pengelolaan dana desa.					
87.	Saya merasa mampu menyatakan saran mengenai pengelolaan dana desa tanpa mendapat tekanan dari siapapun.					
Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi						
88.	Saya yakin bahwa penilaian atas pekerjaan saya dilakukan oleh rekan seprofesi yang memahami tentang pengelolaan dana desa.					
89.	Saya yakin rekan kerja saya memberikan penilaian dengan jujur yang sesuai peraturan profesi					
90.	Saya yakin rekan kerja saya memiliki wewenang dalam hal menilai pekerjaan saya terkait pengelolaan dana desa.					
Hubungan dengan Sesama Profesi						
91.	Saya merasa dapat bekerjasama dengan pegawai lain di tempat saya bekerja.					
92.	Saya merasa hubungan saya dengan pegawai lainnya terjalin dengan baik selama bekerja di tempat saya bekerja.					
93.	Saya sering mengajak rekan-rekan yang ada di tempat saya bekerja untuk bertukar pendapat tentang masalah yang ada baik dalam organisasi maupun organisasi lain.					

Lampiran 4

TABULASI DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Nama	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)																									Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Y.22	Y.23	Y.24	Y.25	
R1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	124
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
R6	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
R7	5	3	3	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	114
R8	5	3	3	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	114
R9	5	5	5	5	5	5	4	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	116
R10	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	109
R11	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	117
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R14	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	101
R15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
R17	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	109
R18	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	109
R19	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	109
R20	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	109

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

Nama	Partisipasi Masyarakat (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
R1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	43
R6	4	4	4	4	3	5	4	4	5	37
R7	5	5	5	4	3	4	4	4	4	38
R8	5	5	5	4	3	4	4	4	4	38
R9	4	5	5	4	4	5	4	4	5	40
R10	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
R11	4	4	4	4	4	3	4	4	5	36
R12	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43
R13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R14	5	4	5	2	2	2	4	4	4	32
R15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R17	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
R18	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
R19	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
R20	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
R21	4	5	5	4	3	5	5	5	5	41
R22	4	5	5	4	3	5	5	5	5	41
R23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R24	4	5	5	4	3	5	5	5	5	41
R25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R30	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38

R31	3	5	5	3	3	4	5	5	5	38
R32	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

Nama	Sistem Pengendalian Intern (X2)																											Total	
	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2. 10	X2. 11	X2. 12	X2. 13	X2. 14	X2. 15	X2. 16	X2. 17	X2. 18	X2. 19	X2. 20	X2. 21	X2. 22	X2. 23	X2. 24	X2. 25	X2. 26	X2. 27		X2. 28
R1	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	138
R2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	138
R3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
R4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	138
R5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	130
R6	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	5	5	5	115
R7	5	5	3	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	117
R8	5	5	3	3	5	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	113
R9	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	125
R10	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	123
R11	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	107
R12	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	129
R13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	137
R14	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	117
R15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	137
R16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	137
R17	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	122
R18	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	122
R19	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	122
R20	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	122

R2 1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	126
R2 2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	125
R2 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112
R2 4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	126
R2 5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	116
R2 6	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	116
R2 7	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	116
R2 8	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	116
R2 9	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	131
R3 0	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	130
R3 1	4	5	3	5	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	108
R3 2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	126

R31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	65
R32	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	71

R31	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	56
R32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	69

	tailed)										0										0						
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.646	.481	.487	.344	.218	.254	.215	.770	.140	.722	.866	.866	1	.722	.832	.722	.333	.222	.380	.620	.866	.722	.254	.298	.576	.780**
		.000	.005	.005	.054	.230	.160	.237	.000	.444	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.062	.222	.032	.000	.000	.000	.160	.098	.001	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.413	.418	.377	.294	.522	.133	.030	.592	.037	.490	.724	.724	.722	1	.770	1.000	.190	.646	.473	.861	.724	.861	.572	.262	.741	.756**
		.019	.017	.033	.102	.002	.469	.869	.000	.840	.004	.000	.000	.000		.000	0.000	.298	.000	.006	.000	.000	.000	.001	.147	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.286	.542	.527	.504	.402	.527	.375	.814	.029	.677	.939	.939	.832	.770	1	.770	.615	.470	.753	.639	.939	.639	.387	.311	.498	.857**
		.113	.001	.002	.003	.022	.002	.034	.000	.876	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.028	.083	.004	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.413	.418	.377	.294	.522	.133	.030	.592	.037	.490	.724	.724	.722	1.000	.770	1	.190	.646	.473	.861	.724	.861	.572	.262	.741	.756**
		.019	.017	.033	.102	.002	.469	.869	.000	.840	.004	.000	.000	.000	0.000	.000		.298	.000	.006	.000	.000	.000	.001	.147	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.050	.333	.268	.516	.655	.923	.798	.433	.047	.356	.577	.577	.333	.190	.615	.190	1	.167	.698	.038	.577	.038	.120	.235	.037	.534**
		.787	.062	.138	.002	.000	.000	.000	.013	.800	.046	.001	.001	.062	.298	.000	.298		.362	.000	.836	.001	.836	.512	.196	.842	.002
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.050	.222	.149	.387	.436	.120	.190	.577	.171	.485	.433	.433	.222	.646	.470	.646	.167	1	.551	.646	.433	.646	.762	.329	.698	.606**
		.787	.222	.415	.029	.013	.512	.298	.001	.349	.005	.013	.013	.222	.000	.007	.000	.362		.001	.000	.013	.000	.000	.066	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1	Pearson Correlation	.181	.380	.345	.626	.457	.756	.473	.573	.033	.467	.700	.700	.380	.473	.753	.473	.698	.551	1	.473	.700	.339	.615	.368	.352	.702**

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.280	.340	.565**	.325	.072	.353 ⁺	-.004	.204	.519**
	Sig. (2-tailed)		.121	.057	.001	.070	.694	.048	.985	.263	.002
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	.280	1	.939**	.232	.122	.580**	.445 ⁺	.564**	.405 ⁺	.707**
	Sig. (2-tailed)	.121		.000	.201	.507	.001	.011	.001	.022	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	.340	.939**	1	.020	-.038	.366 ⁺	.371 ⁺	.506**	.312	.566**
	Sig. (2-tailed)	.057	.000		.912	.836	.040	.037	.003	.082	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	.565**	.232	.020	1	.741**	.553**	.535**	.166	.483**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.201	.912		.000	.001	.002	.364	.005	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.5	Pearson Correlation	.325	.122	-.038	.741**	1	.429 ⁺	.297	.363 ⁺	.323	.649**
	Sig. (2-tailed)	.070	.507	.836	.000		.014	.099	.041	.071	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.6	Pearson Correlation	.072	.580**	.366 ⁺	.553**	.429 ⁺	1	.479**	.528**	.487**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.694	.001	.040	.001	.014		.005	.002	.005	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.7	Pearson Correlation	.353 ⁺	.445 ⁺	.371 ⁺	.535**	.297	.479**	1	.649**	.678**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.048	.011	.037	.002	.099	.005		.000	.000	.000

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	X2.21	X2.22	X2.23	X2.24	X2.25	X2.26	X2.27	X2.28	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .473 .006 32	.224 .218 32	.272 .132 32	.335 .061 32	.647 .000 32	.452 .009 32	.770 .000 32	.548 .001 32	.599 .000 32	.830 .000 32	.473 .006 32	.555 .001 32	.420 .017 32	.170 .352 32	.036 .847 32	.662 .000 32	.317 .078 32	.385 .029 32	.506 .003 32	.197 .279 32	.066 .721 32	.045 .805 32	.431 .014 32	.642 .000 32	.180 .325 32	.326 .069 32	.218 .230 32	.669** .000 32
X2.2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 .006 32	1 .024 32	-.056 .896 32	-.559 .763 32	.285 .114 32	.651 .000 32	.371 .037 32	.649 .000 32	.555 .001 32	.365 .040 32	.611 .000 32	.681 .000 32	-.057 .756 32	.099 .591 32	-.159 .384 32	.114 .535 32	.673 .000 32	.599 .000 32	.216 .234 32	.191 .295 32	-.064 .729 32	.006 .973 32	-.035 .849 32	-.057 .756 32	.370 .037 32	.271 .134 32	.411 .019 32	.498** .004 32
X2.3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.224 .218 32	-.024 .896 32	1 .112 32	-.148 .418 32	.338 .058 32	.213 .243 32	.308 .087 32	.166 .365 32	.216 .234 32	.260 .150 32	-.120 .512 32	-.048 .796 32	.140 .446 32	-.109 .554 32	.019 .920 32	.367 .039 32	.145 .427 32	-.025 .893 32	.238 .189 32	0.000 1.000 32	0.000 1.000 32	.335 .061 32	.322 .073 32	.299 .096 32	.224 .217 32	.322 .073 32	.242 .182 32	.334 .062 32
X2.4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.272 .132 32	.335 .061 32	.224 .218 32	1 .121 32	-.365 .040 32	.400 .023 32	.448 .010 32	.368 .038 32	.293 .104 32	.307 .087 32	-.056 .763 32	.022 .905 32	.077 .676 32	-.171 .351 32	.123 .503 32	.300 .095 32	.011 .951 32	-.027 .884 32	.213 .242 32	.175 .339 32	.291 .106 32	.499 .004 32	.568 .001 32	.372 .036 32	-.062 .735 32	.085 .646 32	.132 .471 32	.349 .051 32
X2.5	Pearson Correlation	.335 .559 32	-.148 .121 32	-.121 1 32	-.365 .551 32	.400 .561 32	.448 .221 32	.368 .340 32	.293 .467 32	.307 .347 32	-.056 .787 32	.022 .727 32	-.171 .174 32	.123 .041 32	.300 .278 32	.011 .485 32	.951 .608 32	.951 .176 32	.884 .280 32	.884 .168 32	.242 .280 32	.339 .168 32	.004 .116 32	.001 .070 32	.036 .109 32	.735 .392 32	.646 .378 32	.471 .329 32	.493**

Lampiran 6

HASIL UJI RELIABILITAS

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.943	.954	25

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.844	.854	9

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.930	.932	28

4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.885	.891	16

5. Variabel Profesionalitas (M)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.907	.909	15

Lampiran 7

DAFTAR LAMPIRAN RESPONDEN PENELITIAN

NO. RES	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	NAMA DESA
1.	Anna Mariyati	Perempuan	Kepala Desa	Glantengan
2.	Moch. Mustaqim	Laki-laki	Sekretaris Desa	Glantengan
3.	Harmami	Perempuan	Bendahara Desa	Glantengan
4.	Mochammad Ulul Azmi	Laki-laki	Kepala Seksi	Glantengan
5.	Hendro Rizqi Aprilyanto	Laki-laki	Kepala Desa	Singocandi
6.	Sumarno	Laki-laki	Sekretaris Desa	Singocandi
7.	Puji Ekasari	Perempuan	Bendahara Desa	Singocandi
8.	Siti Halimah	Perempuan	Kepala Seksi	Singocandi
9.	R. Hidayat	Laki-laki	Kepala Desa	Kauman
10.	M. Lukman Hakim	Laki-laki	Sekretaris Desa	Kauman
11.	Fika Rachmawati	Perempuan	Bendahara Desa	Kauman
12.	Niken Setyorini	Perempuan	Kepala Seksi	Kauman
13.	Moh Maftukhan	Laki-laki	Kepala Desa	Langgardalem
14.	Qohhar Salsabil Fahdi	Laki-laki	Sekretaris Desa	Langgardalem
15.	Naelatus Salamah	Perempuan	Bendahara Desa	Langgardalem
16.	Farid Stiawawan	Laki-laki	Kepala Seksi	Langgardalem
17.	Moh Said Romadlon	Laki-laki	Kepala Desa	Damaran
18.	Mursetiyono	Laki-laki	Sekretaris Desa	Damaran
19.	Zaimidah	Perempuan	Bendahara Desa	Damaran
20.	Rina Setyo Lestari	Perempuan	Kepala Seksi	Damaran
21.	Sofwan Durri	Laki-laki	Kepala Desa	Krandon
22.	Mariah	Perempuan	Sekretaris Desa	Krandon
23.	Nor Salim	Laki-laki	Bendahara Desa	Krandon
24.	Karsan	Laki-laki	Kepala Seksi	Krandon
25.	Alex Fahmi	Laki-laki	Kepala Desa	Demangan
26.	Qurrotul 'Ain	Perempuan	Sekretaris Desa	Demangan
27.	Khairil Anwar	Laki-laki	Bendahara Desa	Demangan
28.	Imtisal	Laki-laki	Kepala Seksi	Demangan
29.	Noor Aziz	Laki-laki	Kepala Desa	Janggalan
30.	Imam Muzaka	Laki-laki	Sekretaris Desa	Janggalan
31.	Suparti	Perempuan	Bendahara Desa	Janggalan
32.	Nadziroh	Perempuan	Kepala Seksi	Janggalan

Lampiran 8

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi.

No.	Variabel	Indikator	No. Soal	Jumlah Soal
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Perencanaan	1,2,3,4	25
		2) Pelaksanaan	5,6,7,8,9	
		3) Penatausahaan	10,11,12,13,14,15,	
		4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban	16	
		(Permendagri No. 113 Tahun 2014)	17,18,19 20,21,22,23,24,25	
2.	Partisipasi Masyarakat	1) Pengambilan keputusan	26,27,28	9
		2) Penyusunan anggaran	29,30,31	
		3) Pelaksanaan anggaran	32,33,34	
		(Heller <i>et al</i> (1984) dan Sujarweni (2018))		
3.	Sistem Pengendalian Intern	1) Lingkungan pengendalian	35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44	28
		2) Penilaian risiko	45,46,47	
		3) Kegiatan pengendalian	48,49,50,51,52,53,	
		4) Informasi dan komunikasi	54	
		5) Pemantauan pengendalian internal	55,56,57,58,59	
		(PP Nomor 60 Tahun 2008)	60,61,62	
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja	63,64,65	16
		2) Jaringan komputer telah dimanfaatkan		

No.	Variabel	Indikator	No. Soal	Jumlah Soal
		sebagai penghubung antar unit kerja, dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 3) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi 4) Pengelolaan dana transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi (Jurnali dan Supomo (2002))	66,67,68 69,70,71,72 73,74,75 76,77,78	
5.	Profesionalitas	1) Pengabdian Pada Profesi 2) Kewajiban Sosial 3) Kemandirian 4) Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi 5) Hubungan dengan Sesama Profesi (Morrow dan Goets (1998) dan Abdullah Adri 2017)	79,80,81 82,83,84 85,86,87 88,89,90 91,92,93	15

Lampiran 9

ANGKET PENELITIAN



**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
PROFESIONALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)**

KUESIONER PENELITIAN

Oleh

Siti Ulya Ani

NIM 7101416310

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa
di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ulya Ani
NIM : 7101416310
Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut. Kuesioner berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi adalah “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pemerintah desa. Oleh karena itu saat menjawab pertanyaan kuesioner ini diharapkan Bapak/Ibu/Sdr/i bersikap terbuka dan jujur. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi kuesioner ini saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Siti Ulya Ani
NIM. 7101416310

KUESIONER PENELITIAN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi identitas secara lengkap. Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data. Untuk jawaban pilihan dilakukan dengan memberi tanda *checklist* (✓)

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD D3
 SMP S1
 SMA/SMK S2
Lainnya
5. Jurusan :
6. Nama Desa :
7. Jabatan : Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Bendahara Desa
 Kepala seksi
8. Masa Kerja : Tahun
9. Pelatihan yang pernah diikuti :
10. Ikatan Profesi yang diikuti :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon dengan hormat, bantuan, kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini.
2. Berikan tanda *checklist* (✓) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

SS	Sangat Setuju
S	Setuju
RR	Ragu-Ragu
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Perencanaan						
1.	Aparatur desa ikut menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.					
2.	Aparatur desa merasa Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.					
3.	Aparatur desa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa					
4.	Aparatur desa merasa Raperdes APBDesa telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.					
Pelaksanaan						
5.	Pengeluaran dana desa di desa saya dilaksanakan melalui rekening kas desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
6.	Pemasukan dana desa di desa saya dilaksanakan melalui rekening kas desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
7.	Pemerintahan desa tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.					
8.	Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa dengan besar yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.					
Penatausahaan						
9.	Aparatur desa merasa penatausahaan di desa tempat saya bekerja telah dilakukan oleh aparatur desa yang bersangkutan.					
10.	Pencatatan setiap pengeluaran dana desa yang terjadi telah dilakukan oleh aparatur di desa tempat saya bekerja.					
11.	Pencatatan setiap penerimaan dana desa telah dilakukan oleh aparatur di desa tempat saya bekerja.					
12.	Bendahara desa telah melakukan tutup					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
	buku pada setiap akhir bulan.					
13.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Kas Umum guna mempermudah dalam pengelolaan dana di desa tempat saya bekerja.					
14.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Kas Pembantu guna memperlancar dalam pengelolaan dana di desa tempat saya bekerja.					
15.	Aparatur desa telah menggunakan Buku Bank guna mempermudah dalam pengelolaan dana desa di tempat saya bekerja.					
Pelaporan						
16.	Aparatur desa merasa kepala desa di tempat saya bekerja telah menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.					
17.	Aparatur desa merasa kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.					
18.	Di desa tempat saya saya bekerja kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun.					
Pertanggungjawaban						
19.	Saya sebagai aparatur desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.					
20.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang berupa pendapatan belanja dibuat oleh aparatur desa di desa tempat saya bekerja.					
21.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang berupa pembiayaan dibuat oleh aparatur desa di desa tempat saya bekerja.					
22.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.					
23.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
	saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa evaluasi terpisah.					
24.	Saya sebagai aparatur desa di desa tempat saya bekerja merasa telah melampirkan format laporan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.					

Partisipasi Masyarakat

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Pengambilan Keputusan						
25.	Masyarakat di desa saya terlibat dalam pengambilan keputusan program terkait pengelolaan dana desa.					
26.	Aparatur desa memberi kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan saran terkait dengan pengelolaan dana desa yang bersifat membangun.					
27.	Aparatur desa menerima kritikan terkait dengan pengelolaan dana desa dari masyarakat yang bersifat membangun.					
Penyusunan Anggaran						
28.	Masyarakat desa terlibat aktif dalam membuat rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan ketika penyusunan anggaran Dana Desa oleh Kepala desa dan/atau BPD.					
29.	Rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa diusulkan oleh masyarakat desa yang diajukan kepada kepala desa dan/atau BPD ketika penyusunan anggaran Dana Desa.					
30.	Masyarakat desa terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa.					
Pelaksanaan Anggaran						

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
31.	Saya merasa masyarakat desa selalu dilibatkan dalam pelaksanaan tentang perencanaan pengelolaan dana desa.					
32.	Saya bersedia menerima serta memanfaatkan hasil pembangunan sebagai wujud pengelolaan dana desa.					
33.	Saya merasa masyarakat desa terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa.					

Sistem Pengendalian Intern

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
34.	Saya merasa adanya penegakan integritas di desa tempat saya bekerja.					
35.	Saya merasa masih terdapat nilai etika di desa tempat saya bekerja.					
36.	Struktur organisasi di desa saya telah menggambarkan dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian.					
37.	Saya merasa wewenang yang diberikan kepada aparatur desa di desa saya sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya secara cukup.					
38.	Adanya penyusunan kebijakan yang sehat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tempat saya bekerja.					
39.	Adanya penerapan kebijakan yang sehat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tempat saya bekerja.					
40.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut berperan dalam pengawasan intern di desa tempat saya bekerja.					
41.	Saya menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan.					
Penilaian Risiko						
42.	Saya telah memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap dana desa.					

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
43.	Di desa tempat saya bekerja selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh Inspektorat.					
44.	Saya merasa di desa tempat saya bekerja dalam penilaian risiko, komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.					
Kegiatan Pengendalian						
45.	Saya merasa terdapat kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah di desa saya.					
46.	Kegiatan pengendalian di desa saya harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.					
47.	Kegiatan pengendalian yang dipilih di desa saya disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.					
48.	Saya merasa kebijakan pengendalian di desa saya harus ditetapkan secara tertulis.					
49.	Saya merasa prosedur pengendalian di desa saya harus ditetapkan secara tertulis.					
50.	Prosedur pengendalian yang telah ditetapkan di desa saya harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.					
51.	Saya merasa kegiatan pengendalian di desa saya dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.					
Informasi dan Komunikasi						
52.	Pemerintah desa di desa tempat saya bekerja telah menyediakan alat pendukung untuk sarana komunikasi yang memadai.					
53.	Saya merasa dapat memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dengan baik.					
54.	Saya merasa dapat mengelola sistem informasi secara terus menerus.					
55.	Saya merasa dapat mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.					
56.	Saya merasa selalu memperbaharui sistem informasi secara berkala.					
Pemantauan Pengendalian Internal						

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
57.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut andil dalam pemantauan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan di desa saya.					
58.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut serta dalam melakukan evaluasi terpisah terhadap sistem pengendalian internal secara berkala di desa saya.					
59.	Saya sebagai aparatur desa merasa ikut melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta review lainnya terhadap sistem pengendalian intern					

Pemanfaatan Teknologi Informasi

NO.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Jaringan Internet						
60.	Di kantor pemerintah desa saya terdapat jaringan internet yang mendukung sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur.					
61.	Adanya jaringan internet yang terpasang saya sebagai aparatur desa menjadi mudah dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dalam pengelolaan dana desa.					
Pemanfaatan Jaringan Komputer						
62.	Saya memanfaatkan jaringan komputer dalam mempermudah pengelolaan dana desa dan tidak menghambat prosedur yang berlaku.					
63.	Saya memanfaatkan jaringan komputer sebagai penghubung unit kerja saya dengan yang lainnya.					
64.	Saya memanfaatkan jaringan komputer untuk memperoleh informasi yang saya butuhkan.					
Pencatatan Secara Komputerisasi						
65.	Sejak awal transaksi yang terjadi saya mencatat dengan menggunakan komputer.					
66.	Saya mencatat dana yang masuk dengan komputer.					
67.	Saya membuat laporan keuangan dengan computer ahgar alokasi dana desa lebih bagus.					
Pengelolaan dengan Software Sesuai UU						

68.	Saya mengetahui software yang harus digunakan ketika mencatat transaksi keuangan yang diatur Undang-Undang.					
69.	Saya menguasai Siskeudes baik versi lama maupun versi baru.					
70.	Saya mengelola dana desa dengan memanfaatkan Siskeudes.					
Laporan Akuntansi dan Manajerial Dihasilkan Terintegrasi						
71.	Di desa saya bagian pengelola dana desa saling terkait dengan bagian yang lain.					
72.	Laporan keuangan dana desa di desa saya berasal dari berbagai laporan setiap bagian yang membelanjakan dana desa.					
73.	Sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa saya berintegrasi dengan aplikasi siskeudes.					

Profesionalitas

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
Pengabdian Pada Profesi						
74.	Saya sebagai aparatur desa dalam bekerja saya harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan dana desa.					
75.	Saya merasakan suatu kepuasan batin telah menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai aparatur desa yang telah diberikan kepada saya.					
76.	Saya sebagai aparatur desa harus memiliki pengetahuan yang kompeten terkait pengelolaan dana desa.					
Kewajiban Sosial						
77.	Saya mempunyai peran penting di lingkungan tempat saya bekerja sebagai aparatur desa.					
78.	Saya merasa pekerjaan saya sangat bermanfaat terhadap lingkungan tempat saya bekerja.					
79.	Saya akan tetap teguh pada profesi sebagai aparatur desa meskipun saya mendapat tawaran pekerjaan di bidang lainnya.					
Kemandirian						
80.	Saya merasa mampu membuat keputusan sendiri terkait pengelolaan dana desa tanpa					

No.	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
	adanya pengaruh dari pihak lain.					
81.	Saya merasa mampu menyelesaikan suatu pekerjaan terkait pengelolaan dana desa tanpa tekanan dari orang lain di tempat saya bekerja.					
82.	Saya merasa mampu menyatakan saran mengenai pengelolaan dana desa tanpa mendapat mendapat tekanan dari siapapun.					
Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi						
83.	Saya yakin bahwa penilaian atas pekerjaan saya dilakukan oleh rekan seprofesi yang memahami tentang pengelolaan dana desa.					
84.	Saya yakin rekan kerja saya memberikan penilaian dengan jujur yang sesuai peraturan profesi.					
85.	Saya yakin rekan kerja saya memiliki wewenang dalam hal menilai pekerjaan saya terkait pengelolaan dana desa.					
Hubungan dengan Sesama Profesi						
86.	Saya merasa dapat bekerjasama dengan pegawai lain di tempat saya bekerja.					
87.	Saya merasa hubungan saya dengan pegawai lainnya terjalin dengan baik selama bekerja di tempat saya bekerja.					
88.	Saya sering mengajak rekan-rekan yang ada di tempat saya bekerja untuk bertukar pendapat tentang masalah yang ada baik dalam organisasi maupun organisasi lain.					

Lampiran 10

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Nama	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)																								Total	
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Y.22	Y.23	Y.24		
R1	3	3	3	3	5	5	4	2	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	3	3	96	
R2	2	4	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	5	5	5	5	4	4	4	3	3	76	
R3	5	2	1	5	5	4	5	4	4	5	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2	75	
R4	4	4	5	4	2	2	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	80	
R5	2	2	4	2	2	4	2	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	74	
R6	4	4	4	2	2	4	4	2	2	3	3	3	3	4	4	2	4	4	2	2	2	3	2	2	71	
R7	4	3	2	3	4	2	4	4	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78	
R8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96	
R9	4	4	2	4	5	4	4	4	4	2	4	2	2	5	2	4	2	5	4	2	4	2	2	4	81	
R10	2	2	3	2	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	5	2	4	4	4	4	4	4	4	78	
R11	5	2	4	2	5	5	4	4	4	2	4	4	4	2	2	5	2	4	2	2	4	2	2	2	78	
R12	3	2	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	74
R13	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	2	2	2	2	2	2	5	5	5	77	
R14	4	2	2	5	2	2	2	2	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	75	
R15	5	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	5	2	5	5	5	5	5	5	3	3	3	78	
R16	3	3	2	4	2	3	3	2	3	2	3	3	5	5	2	5	2	2	2	2	5	5	5	5	78	
R17	5	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	5	70	
R18	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	5	4	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	76	
R19	5	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	5	2	2	5	5	5	5	4	5	73	

R20	5	4	5	5	5	5	5	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	5	2	3	2	80	
R21	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	69
R22	5	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	76	
R23	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	5	67
R24	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	71
R25	5	3	2	2	2	2	3	3	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	5	2	2	5	4	4	68
R26	4	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	4	4	71
R27	3	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3	3	2	2	2	5	5	2	2	2	2	5	5	4	4	70
R28	2	2	2	2	5	5	5	5	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	4	4	72
R29	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	5	4	2	2	2	5	76
R30	3	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	3	3	2	2	3	5	5	5	5	5	5	78
R31	3	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	74
R32	3	3	3	5	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	5	2	2	3	3	5	67

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

Nama	Partisipasi Masyarakat (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
R1	3	4	5	3	4	4	2	2	4	31
R2	5	4	4	3	3	2	3	2	2	28
R3	3	4	5	1	3	4	4	4	4	32
R4	3	4	4	3	3	3	4	2	4	30
R5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
R6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
R7	3	4	3	3	3	3	4	4	3	30
R8	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
R9	3	4	2	4	2	2	3	4	5	29
R10	2	4	4	4	2	4	4	2	4	30
R11	2	4	3	2	2	5	5	2	5	30
R12	2	4	4	3	3	3	3	3	4	29
R13	3	4	3	3	5	5	2	5	2	32
R14	5	4	5	2	2	2	2	3	3	28
R15	2	4	5	3	4	4	2	2	2	28
R16	3	4	5	5	5	2	2	2	5	33
R17	5	4	2	2	2	2	5	4	4	30
R18	5	4	2	2	2	4	2	4	4	29
R19	2	4	3	4	4	2	5	2	4	30
R20	3	4	4	4	2	4	2	4	4	31
R21	2	4	5	5	5	2	2	2	5	32
R22	4	4	3	4	4	2	4	4	2	31
R23	4	4	2	4	2	3	2	2	3	26
R24	5	4	4	3	4	2	3	3	2	30
R25	4	4	1	1	1	4	5	4	5	29
R26	2	4	5	2	5	2	2	2	2	26
R27	5	4	4	3	3	4	3	4	2	32
R28	3	4	3	4	4	4	4	2	3	31

R29	4	4	2	2	3	3	2	5	5	30
R30	2	4	5	5	2	5	2	2	5	32
R31	5	4	3	2	5	2	3	4	3	31
R32	2	4	3	2	3	2	5	2	5	28

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

Nama	Sistem Pengendalian Intern (X2)																										Total
	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2. 10	X2. 11	X2. 12	X2. 13	X2. 14	X2. 15	X2. 16	X2. 17	X2. 18	X2. 19	X2. 20	X2. 21	X2. 22	X2. 23	X2. 24	X2. 25	X2. 26	
R1	4	2	3	3	2	2	4	2	4	2	2	4	2	3	2	3	2	4	2	2	4	2	4	2	4	2	72
R2	3	4	4	4	2	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	5	2	4	4	2	4	4	91
R3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	2	4	98
R4	4	4	3	3	3	4	3	5	4	4	3	3	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	3	3	99
R5	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
R6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
R7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	99
R8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	98
R9	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	5	3	4	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	96
R10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	99
R11	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	98
R12	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
R13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	78
R14	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	97
R15	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
R16	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	93
R17	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	87
R18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4	87
R19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	96
R20	5	2	4	2	2	4	2	4	2	3	4	2	4	2	4	2	4	3	5	2	4	2	4	2	5	5	84
R21	5	3	5	3	4	5	5	3	5	4	2	3	3	5	2	4	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	96
R22	4	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	3	4	83

R23	2	5	5	2	5	2	5	2	5	5	3	5	2	2	3	3	2	4	2	4	2	3	2	2	5	2	84
R24	4	2	4	2	3	2	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	4	82
R25	2	4	2	4	2	4	2	2	4	4	2	4	3	4	2	4	2	3	5	5	4	4	4	4	2	3	85
R26	5	3	5	2	5	2	3	5	5	3	5	3	5	5	5	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	3	87
R27	4	5	2	4	2	4	2	2	5	4	5	2	4	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	2	87
R28	5	2	3	2	3	2	3	5	2	2	2	5	2	5	5	2	2	5	2	3	4	5	2	5	2	5	85
R29	2	4	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	5	3	4	3	2	2	4	2	2	2	2	82
R30	3	5	3	4	4	2	3	3	3	4	4	2	3	2	3	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	5	83
R31	5	2	5	2	5	3	5	5	4	5	2	2	5	2	5	3	5	3	2	2	5	2	2	3	5	4	93
R32	2	3	2	5	4	5	2	5	2	4	5	4	2	5	2	5	2	5	5	5	2	5	5	5	4	3	98

4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Nama	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)														Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	
R1	5	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	2	48
R2	3	5	3	5	2	5	3	2	4	3	2	4	2	4	47
R3	4	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	47
R4	5	2	5	2	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	47
R5	2	5	2	5	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	50
R6	5	2	5	2	2	2	4	5	3	4	3	4	2	4	47
R7	4	3	5	3	5	3	2	2	4	2	3	4	4	4	48
R8	2	5	2	5	2	4	3	5	5	4	2	2	4	2	47
R9	4	4	3	2	3	4	4	3	4	2	4	5	4	4	50
R10	5	4	5	4	4	5	4	2	2	3	2	4	4	4	52
R11	5	2	3	5	5	3	5	5	4	2	4	2	4	4	53
R12	4	5	5	4	2	4	4	5	2	4	2	4	2	4	51
R13	5	2	5	5	5	5	2	5	3	2	4	2	3	2	50
R14	2	5	2	5	2	5	3	2	5	5	2	5	2	3	48
R15	1	2	3	5	2	5	2	5	5	5	2	5	5	5	52
R16	5	3	5	5	5	2	5	2	2	2	3	2	5	5	51
R17	2	4	2	5	4	3	2	2	4	4	4	5	4	2	47
R18	5	2	4	2	4	2	3	3	2	2	2	2	2	4	39
R19	2	5	2	4	2	4	4	4	3	3	3	2	4	2	44
R20	5	2	3	2	4	2	4	2	4	4	4	5	3	2	46
R21	5	3	2	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	37
R22	2	2	3	2	4	2	4	2	2	4	3	2	4	2	38
R23	5	3	4	3	2	3	2	3	3	2	4	3	2	4	43
R24	4	4	2	4	2	2	4	2	2	4	2	4	4	2	42
R25	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	3	2	2	5	44
R26	3	4	2	5	2	5	4	2	3	4	2	4	4	2	46

R27	2	5	3	2	4	2	3	5	4	5	3	4	2	3	47
R28	5	2	5	3	5	3	5	2	5	2	5	5	4	3	54
R29	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	49
R30	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	50
R31	3	5	2	5	2	5	3	5	3	5	3	5	3	5	54
R32	4	5	3	3	4	5	3	5	4	5	2	5	2	2	52

5. Variabel Profesionalitas (M)

Nama	Profesionalitas (M)															Total
	M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8	M.9	M.10	M.11	M.12	M.13	M.14	M.15	
R1	2	5	2	5	5	5	5	5	2	5	2	2	2	4	2	53
R2	4	5	5	5	2	5	5	2	4	2	3	2	2	2	3	51
R3	2	3	3	4	5	4	5	4	3	4	5	2	2	2	2	50
R4	2	2	4	5	5	4	3	3	5	4	2	1	5	4	3	52
R5	5	3	2	4	5	4	3	2	5	5	5	5	5	5	3	61
R6	3	2	2	1	2	2	4	2	5	5	5	5	5	5	4	52
R7	4	2	4	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	4	4	53
R8	2	2	5	5	5	4	1	2	5	5	5	5	2	1	2	51
R9	1	5	5	5	5	5	2	4	1	3	3	3	4	4	4	54
R10	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	1	2	1	4	58
R11	2	2	4	1	4	4	1	2	4	4	5	5	5	5	2	50
R12	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4	50
R13	2	5	2	5	2	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	54
R14	5	5	1	5	5	5	5	5	5	2	2	1	2	1	2	51
R15	1	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	3	53
R16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	3	4	60
R17	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	1	55
R18	2	4	2	4	4	4	4	4	2	1	4	4	4	4	4	51
R19	4	1	1	4	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	53
R20	4	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	52
R21	2	1	2	5	1	2	4	5	3	3	5	4	4	5	5	51
R22	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3	4	39
R23	4	4	4	1	3	3	1	3	1	3	1	3	3	1	1	36
R24	3	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	4	4	4	38
R25	5	5	5	5	3	3	1	3	1	2	2	1	1	1	1	39
R26	1	1	2	1	5	2	1	2	1	4	1	5	1	5	5	37
R27	2	4	2	1	1	2	2	2	1	3	4	3	2	4	5	38
R28	2	5	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	4	5	5	36
R29	5	2	1	1	1	1	3	1	2	1	1	5	5	5	5	39
R30	5	1	5	1	3	2	1	3	2	1	2	2	2	3	5	38

R31	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	5	1	1	39
R32	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	5	3	39

Lampiran 11

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF PER VARIABEL

Output SPSS

Distribusi Frekuensi Per Variabel

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	100-118	29	45,31%	Sangat Tinggi	92,81
2	81-99	35	54,69%	Tinggi	
3	62-80	0	0%	Cukup	
4	43-61	0	0%	Rendah	
5	24-42	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

2. Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	36-42	31	48,44%	Sangat Tinggi	34,83
2	29-35	33	51,56%	Tinggi	
3	23-28	0	0%	Cukup	
4	16-22	0	0%	Rendah	
5	9-15	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	110-130	21	32,81%	Sangat Baik	103,02
2	89-109	29	45,31%	Baik	
3	68-88	14	21,88%	Cukup	
4	47-67	0	0%	Kurang Baik	
5	26-46	0	0%	Tidak Baik	
Total		64	100%	Baik	

4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	58-68	28	43,75%	Sangat Tinggi	55,34

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
2	47-57	29	45,31%	Tinggi	
3	36-46	7	10,94%	Cukup	
4	25-35	0	0%	Rendah	
5	14-24	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

5. Variabel Profesionalitas

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kriteria	Mean
1	62-73	21	32,81%	Sangat Tinggi	56,16
2	50-61	31	48,44%	Tinggi	
3	39-49	12	18,75%	Cukup	
4	27-38	0	0%	Rendah	
5	15-26	0	0%	Sangat Rendah	
Total		64	100%	Tinggi	

Lampiran 12

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF PER INDIKATOR

1. Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan	64	8	20	14.97	3.858
Pelaksanaan	64	8	20	15.11	4.560
Penatausahaan	64	15	35	26.42	6.488
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	64	17	45	36.28	6.744
Valid N (listwise)	64				

2. Indikator Partisipasi Masyarakat

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengambilan Keputusan	64	8	15	12.00	2.153
Penyusunan Anggaran	64	6	15	11.11	2.444
Pelaksanaan Anggaran	64	6	30	15.47	6.621
Valid N (listwise)	64				

3. Indikator Sistem Pengendalian Intern

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lingkungan Pengendalian	64	22	40	32.25	5.282
Penilaian Risiko	64	6	15	12.25	2.204
Kegiatan Pengendalian	64	19	35	27.23	4.124
Informasi dan Komunikasi	64	11	25	19.56	3.459
Pemantauan Pengendalian Internal	64	6	30	15.41	6.138
Valid N (listwise)	64				

4. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jaringan Internet	64	3	10	8.31	1.511
Pemanfaatan Jaringan	64	8	15	12.00	2.397
Komputer	64	7	15	11.78	2.340
Pencatatan Secara	64	6	15	11.25	2.469
Komputerisasi	64	7	15	12.00	2.475
Pengelolaan dengan	64	6	15	11.25	2.469
Software Sesuai UU	64	6	15	11.25	2.469
Laporan Akuntansi dan	64	7	15	12.00	2.475
Manajerial Dihasilkan	64	7	15	12.00	2.475
Terintegrasi	64	7	15	12.00	2.475
Valid N (listwise)	64				

5. Indikator Profesionalitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengabdian Pada Profesi	64	4	15	11.48	3.246
Kewajiban Sosial	64	3	15	11.73	3.056
Kemandirian	64	4	15	10.94	3.299
Keyakinan Terhadap	64	3	15	10.67	3.097
Peraturan Profesi	64	3	15	10.67	3.097
Hubungan dengan Sesama	64	5	30	15.41	6.666
Profesi	64	5	30	15.41	6.666
Valid N (listwise)	64				

Tabel Kriteria Variabel

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a) Perencanaan

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 4 = 20$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 4 = 4$$

$$\text{Rentang} = (20-4) = 16$$

$$\text{Interval} = 3,2 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	16-18	Sangat Tinggi
2.	13-15	Tinggi
3.	10-12	Cukup
4.	7-9	Rendah
5.	4-6	Sangat Rendah

b) Pelaksanaan

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 4 = 20$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 4 = 4$$

$$\text{Rentang} = (20-4) = 16$$

$$\text{Interval} = 3,2 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	16-18	Sangat Tinggi
2.	13-15	Tinggi
3.	10-12	Cukup
4.	7-9	Rendah
5.	4-6	Sangat Rendah

c) Penatausahaan

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 7 = 35$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 7 = 7$$

$$\text{Rentang} = (35-7) = 28$$

$$\text{Interval} = 5,6 \text{ dibulatkan } 6$$

No.	Interval	Kriteria
1.	27-31	Sangat Tinggi
2.	22-26	Tinggi
3.	17-21	Cukup
4.	12-16	Rendah
5.	7-11	Sangat Rendah

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 9 = 45$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 9 = 9$$

$$\text{Rentang} = (45-9) = 36$$

$$\text{Interval} = 7,2 \text{ dibulatkan } 7$$

No.	Interval	Kriteria
1.	37-43	Sangat Tinggi
2.	30-36	Tinggi
3.	23-29	Cukup
4.	16-22	Rendah
5.	9-15	Sangat Rendah

2. Variabel Partisipasi Masyarakat**a) Pengambilan Keputusan**

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 12$$

$$\text{Interval} = 2,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

b) Penyusunan Anggaran

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 12$$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

c) Pelaksanaan Anggaran

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 12$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern

a) Lingkungan Pengendalian

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 8 = 40$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 8 = 8$

Rentang = $(40-8) = 32$

Interval = 6,4 dibulatkan 6

No.	Interval	Kriteria
1.	32-37	Sangat Baik
2.	26-31	Baik
3.	20-25	Cukup
4.	14-19	Kurang Baik
5.	8-13	Tidak Baik

b) Penilaian Risiko

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 12$$

$$\text{Interval} = 2,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Baik
2.	9-10	Baik
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Kurang Baik
5.	3-4	Tidak Baik

c) Kegiatan Pengendalian

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 7 = 35$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 7 = 7$$

$$\text{Rentang} = (35-7) = 28$$

$$\text{Interval} = 5,6 \text{ dibulatkan } 6$$

No.	Interval	Kriteria
1.	27-31	Sangat Baik
2.	22-26	Baik
3.	17-21	Cukup
4.	12-16	Kurang Baik
5.	7-11	Tidak Baik

d) Informasi dan Komunikasi

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 5 = 25$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 5 = 5$$

$$\text{Rentang} = (25-5) = 20$$

$$\text{Interval} = 4$$

No.	Interval	Kriteria
1.	21-23	Sangat Baik
2.	17-20	Baik
3.	13-16	Cukup
4.	9-12	Kurang Baik
5.	5-8	Tidak Baik

e) Pemantauan Pengendalian Internal

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 12$$

$$\text{Interval} = 2,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Baik
2.	9-10	Baik
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Kurang Baik
5.	3-4	Tidak Baik

4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Jaringan Internet

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 2 = 10$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{Rentang} = (10-2) = 8$$

$$\text{Interval} = 1,6 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	10-11	Sangat Tinggi
2.	8-9	Tinggi
3.	6-7	Cukup
4.	4-5	Rendah
5.	2-3	Sangat Rendah

b) Pemanfaatan Jaringan Komputer

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

c) Pencatatan Secara Komputerisasi

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

d) Pengelolaan dengan Software Sesuai UU

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

e) **Laporan Akuntansi dan Manajerial Dihasilkan Terintegrasi**

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 2$$

$$\text{Interval} = 2,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

5. Variabel Profesionalitas

a) **Pengabdian Pada Profesi**

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 2$$

$$\text{Interval} = 2,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

b) Kewajiban Sosial

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

c) Kemandirian

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

d) Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi

Nilai tertinggi = Skor maksimal x Jumlah soal = $5 \times 3 = 15$

Nilai terendah = Skor minimal x Jumlah soal = $1 \times 3 = 3$

Rentang = $(15-3) = 2$

Interval = 2,4 dibulatkan 2

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

e) Hubungan dengan Sesama Profesi

$$\text{Nilai tertinggi} = \text{Skor maksimal} \times \text{Jumlah soal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Nilai terendah} = \text{Skor minimal} \times \text{Jumlah soal} = 1 \times 3 = 3$$

$$\text{Rentang} = (15-3) = 12$$

$$\text{Interval} = 12,4 \text{ dibulatkan } 2$$

No.	Interval	Kriteria
1.	11-12	Sangat Tinggi
2.	9-10	Tinggi
3.	7-8	Cukup
4.	5-6	Rendah
5.	3-4	Sangat Rendah

Lampiran 13

HASIL UJI PRASYARAT

1. Uji Normalitas

One-Sample Monte Carlo Test

		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	7.28990901	
Most Extreme Differences	Absolute	.111	
	Positive	.111	
	Negative	-.086	
Test Statistic		.111	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.047 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.381 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.369
		Upper Bound	.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

2. Uji Linearitas

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.897	.886	6.40266
a. Predictors: (Constant), ZX3_ZM, Zscore(X3), ZX1_ZM, ZX2_ZM, Zscore(X1), Zscore(X2)				
b. Dependent Variable: Y				

Lampiran 14

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95,095	1,744		54,533	,000		
	Zscore(X1)	12,878	2,221	,680	5,797	,000	,132	7,584
	Zscore(X2)	-3,851	2,544	-,203	-1,514	,136	,101	9,945
	Zscore(X3)	8,575	2,075	,453	4,132	,000	,151	6,618
	ZX1_ZM	-,574	2,892	-,010	-,199	,843	,691	1,446
	ZX2_ZM	,024	3,037	,000	,008	,994	,488	2,050
	ZX3_ZM	-3,983	2,486	-,083	-1,602	,115	,667	1,498

2. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.632	1.029		4.503	.000
	Zscore(X1)	1.038	1.310	.275	.792	.432
	Zscore(X2)	-.731	1.500	-.194	-.487	.628
	Zscore(X3)	-.234	1.224	-.062	-.191	.849
	ZX1_ZM	-2.640	1.706	-.235	-1.548	.127
	ZX2_ZM	1.421	1.791	.143	.793	.431
	ZX3_ZM	1.665	1.466	.175	1.135	.261

a. Dependent Variable: AbRes

Lampiran 15

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Selisih Mutlak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95.095	1.744		54.533	.000
	Zscore(X1)	12.878	2.221	.680	5.797	.000
	Zscore(X2)	-3.851	2.544	-.203	-1.514	.136
	Zscore(X3)	8.575	2.075	.453	4.132	.000
	ZX1_ZM	-.574	2.892	-.010	-.199	.843
	ZX2_ZM	.024	3.037	.000	.008	.994
	ZX3_ZM	-3.983	2.486	-.083	-1.602	.115

a. Dependent Variable: Y

2. Uji Pengaruh Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95.095	1.744		54.533	.000
	Zscore(X1)	12.878	2.221	.680	5.797	.000
	Zscore(X2)	-3.851	2.544	-.203	-1.514	.136
	Zscore(X3)	8.575	2.075	.453	4.132	.000
	ZX1_ZM	-.574	2.892	-.010	-.199	.843
	ZX2_ZM	.024	3.037	.000	.008	.994
	ZX3_ZM	-3.983	2.486	-.083	-1.602	.115

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 16

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/2814/UN37.1.7/LT/2020 03 Maret 2020
Hal : Izin Penelitian

Yth. (terlampir)

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Ulya Ani
NIM : 7101416310
Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peran Profesionalitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 9 Maret 2020 s.d 30 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
Dekan FE;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 647 455 100 0

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-03-03 14:12:24)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gedung 1.1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
 Telepon: +6224-8508015, Faksimile: +6224-8508015
 Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/2815/UN37.1.7/LT/2020 03 Maret 2020
 Hal : Izin Penelitian


Yth. Camat Kudus
 Purwosari, Kec. Kota Kudus, Jawa Tengah 59332

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Ulya Ani
 NIM : 7101416310
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
 Semester : Genap
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peran Profesionalitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 9 Maret 2020 s.d 30 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


 a.n. Dekan FE
 Wakil Dekan Bid. Akademik,
 Dr. Kangoy, M.Pd.
 NIP 196205291986011001

Tembusan:
 Dekan FE;
 Universitas Negeri Semarang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
 Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015
 Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/2816/UN37.1.7/LT/2020 03 Maret 2020
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus
 Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Ulya Ani
 NIM : 7101416310
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
 Semester : Genap
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peran Profesionalitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 9 Maret 2020 s.d 30 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
 Dekan FE;
 Universitas Negeri Semarang





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS

Jl. Ganesha Raya Nomor 14 Telpun (0291) 437449

Website : www://kecamatankota.kuduskab.go.id

Email : kecamatankota@kuduskab.go.id

KUDUS 59316

NOMOR : 071/324/29.01/2020

Kudus, 10 Maret 2020

SIFAT :

LAMPIRAN :

PERIHAL :

Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa se Kec. Kota Kudus ✓
di -

KUDUS

Memperhatikan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Semarang tanggal 03 Maret 2020 nomor B/2815/UJN 37.1.7/LT/2020 perihal Ijin Penelitian dan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 9 Maret 2020 Nomor 270/084/39.00/2020, perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI ULYA ANI
Bidang Penelitian : Ekonomi
Alamat : Dk. Nganguk Mranggen, RT 04/ RW 05 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud / keperluan : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi / Tesis / Tugas Akhir) dengan judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Peran Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Penanggungjawab : Dr. Kardoyo, M.Pd
Waktu : Tgl 9 Maret 2020 s/d 30 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar dibantu apabila diperlukan selama kegiatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian seperlunya

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS

ENDANG PRAMUDYAWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19631101 198503 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313

Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010

E-mail : Kesbangkds@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 270/084/39.00/2020

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.
- Memperhatikan : Surat an. Dekan FE Wakil Dekan Bid. Akademik Universitas Negeri Semarang Tanggal 3 Maret 2020 Nomor: B/2816/UN37.1.7/LT/2020 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SITI ULYA ANI
 2. Alamat : Dk. Nganguk Mranggen RT.04 Rw.05 Desa Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
- Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama proposal : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERAN PROFESIONALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
 - b. Tempat/Lokasi : Kabupaten kudus
 - c. Bidang Penelitian : Ekonomi
 - d. Waktu Penelitian : Tgl 9 Maret 2020 s/d 30 April 2020
 - e. Penanggungjawab : Dr. Kardoyo, M.Pd
 - f. Status Penelitian : Baru
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 9 Maret 2020

Pit. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HARSO WIDODO, AP
 Pemula Tk.I
 NIP. 19731014 199311 1 001